

**PENGARUH TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH,
PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN OPINI AUDIT
TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014-2023)

**Usulan Penelitian Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**



**Disusun oleh :
Afifah Maulidina Fariyanto
NIM : 31402300151**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

**PENGARUH TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH,
PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN OPINI AUDIT
TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014-2023)

**Usulan Penelitian Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**



**Disusun oleh :
Afifah Maulidina Fariyanto
NIM : 31402300151**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian Skripsi

**PENGARUH TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH, OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA,
DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014 sampai dengan 2023)

Disusun Oleh:

Afifah Maulidina Fariyanto

NIM. 31402300151

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
sidang panitia ujian Usulan penelitian Skripsi Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 28 November 2024

Pembimbing



Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si, Ak
NIK. 211415028

**PENGARUH TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH, OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA,
DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014 sampai dengan 2023)**

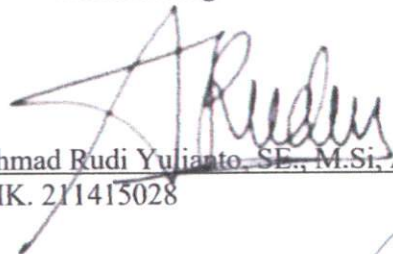
**Disusun Oleh:
Afifah Maulidina Fariyanto
NIM. 31402300151**

Telah dipertahankan di depan penguji

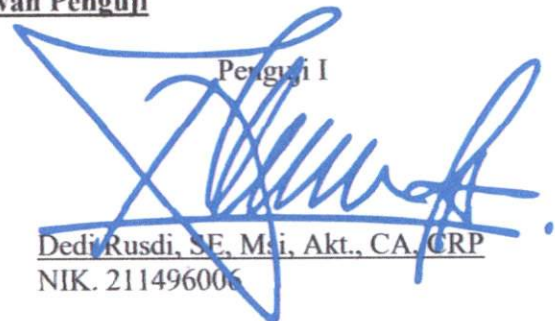
Pada tanggal 29 November 2024

Susunan Dewan Penguji

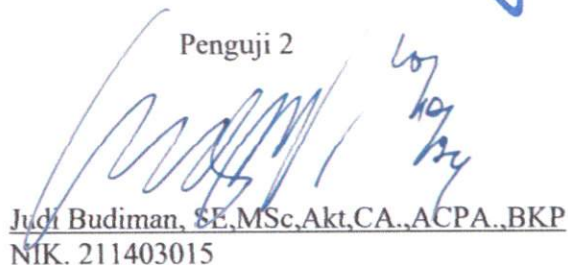
Pembimbing


Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak.
NIK. 211415028

Penguji I


Dedi Rusdi, SE, Msi, Akt., CA, CRP
NIK. 211496006

Penguji 2


Judi Budiman, SE, MSc, Akt, CA., ACPA., BKP
NIK. 211403015

Penelitian Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 29. November 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afifah Maulidina Fariyanto

NIM : 31402300151

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian Skripsi saya dengan judul:

“Pengaruh Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Opini Audit Tahun Sebelumnya di Pemerintah Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sampai dengan 2023”

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 28 November 2024
Yang Menyatakan,



Afifah Maulidina Fariyanto
NIM.31402300151

**PENGARUH TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA
MODAL, DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP
KINERJA KEUANGAN**

(Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2023)

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator yang digunakan untuk memantau, mengukur, mengevaluasi, dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji pengaruh Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2014-2023. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah. Pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah 60 sampel dari 6 Kota diperoleh dengan teknik sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Target Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Kata Kunci: Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

THE EFFECT OF ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE BUDGET , ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE GROWTH, BALANCE FUND, CAPITAL EXPENDITURE, AND THE PREVIOUS YEAR'S AUDIT OPINION ON FINANCIAL PERFORMANCE OF CITY GOVERNMENTS IN CENTRAL JAVA PROVINCE OVER THE PERIOD 2014-2023

ABSTRACT

Local government financial performance is an indicator used to monitor, measure, evaluate, and achieve effective and efficient implementation of regional financial management. This study is expected to examine the influence of original local government revenue budget, original local government revenue growth, balance fund, capital expenditure, and previous year's audit opinion on the Financial Performance of city Governments in Central Java Province in the period 2014-2023. The financial performance of local governments is measured using the regional financial efficiency ratio. Data collection is carried out using secondary data obtained from local government financial statements (LKPD). The population in this study is all cities in Central Java Province. A total of 60 samples from 6 cities were obtained by saturated sample technique. The results of the study show that the local government revenue budget, balance fund, capital expenditure, and previous year's audit opinion have a positive and significant effect on the Financial Performance of Municipal Governments in Central Java Province. Meanwhile, the original local government revenue growth has no effect on the Financial Performance of city Governments in Central Java Province. The results of this study make an important contribution to efforts to improve government performance and services to the community.

Keywords: Original local government revenue budget, original local government revenue growth, balance fund, capital expenditure, and previous year's audit opinion, Financial Performance of Local Government.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi dengan baik yang berjudul **“Pengaruh Target PAD, Pertumbuhan PAD, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Dan Perimbangan, Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014 sampai dengan 2023).**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi usulan penelitian skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hambanya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung
4. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dedi Rusdi, SE, Msi, Akt., CA, CRP dan Bapak Judi Budiman, SE, MSc, Akt, CA., ACPA., BKP selaku Dosen Penguji Usulan Penelitian Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan dan waktu untuk menguji saya.
6. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
7. Kepada Bapak Riyanto dan Ibu Siti Faizah selaku orangtua saya serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan.
8. Kepada Taufan Budi Fariyanto dan Ismail Zein Nur Fariyanto, selaku keluarga besar telah memberikan semangat dan mendoakan.
9. Terimakasih untuk teman-teman S-1 Akuntansi 2023 dan rekan-rekan kerja pada Inspektorat Kota Semarang yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 November 2024

Penulis,



Afifah Maulidina Fariyanto
NIM. 31402300151

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 <i>Grand Theory</i>	12
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2.2 Variabel Penelitian.....	14
2.2.1 Kinerja Keuangan.....	14
2.2.1.1 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	15
2.2.2 Anggaran Pendapatan Asli Daerah	17
2.2.3 Pertumbuhan PAD	21
2.2.4 Opini Audit	22
2.2.5 Dana Perimbangan	28
2.2.6 Belanja Modal	29
2.3 Penelitian Terdahulu	33
2.4 Kerangka Penelitian	54

2.5	Kerangka Penelitian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	58
2.5.1	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	58
2.5.2	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	59
2.5.3	Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	60
2.5.4	Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	61
2.5.5	Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		64
3.1	Jenis Penelitian.....	64
3.2	Populasi dan Sampel	64
3.2.1	Populasi.....	64
3.2.2	Sampel.....	64
3.3	Jenis Dan Sumber data.....	65
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	65
3.5	Definisi operasional variabel	66
3.5.1	Variabel Dependen (Terikat)	66
3.5.2	Variabel Independen	67
3.6	Teknik Analisis Data.....	72
3.6.1	Analisis Statistik Deskripsi	72
3.6.2	Uji Regresi Linear Berganda.....	73
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	74
3.6.3.1	Uji Normalitas	74
3.6.3.2	Uji Heteroskedastisitas	74
3.6.3.3	Uji Autokorelasi.....	75
3.6.3.4	Uji Multikolinearitas.....	75

3.6.4 Uji Hipotesis	76
3.6.4.1 Uji Parsial (Uji t)	76
3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F).....	77
3.6.4.3 Uji R ² (Koefisien Determinasi).....	78
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	79
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	79
4.2 Analisis Data.....	79
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	80
4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik	83
4.2.2.1 Uji Normalitas	83
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas	83
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	84
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	86
4.2.3 Analisis Regresi Berganda	86
4.2.4 Pengujian Hipotesis.....	88
4.2.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	88
4.2.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	89
4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	92
4.3 Pembahasan.....	93
4.3.1. Target Pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	93
4.3.2. Pertumbuhan PAD memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	94
4.3.3. Opini Audit Tahun Sebelumnya memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	95
4.3.4. Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	96
4.3.5. Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	98
BAB V PENUTUP.....	99

5.1 Kesimpulan	99
5.2 Implikasi	100
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	101
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rasio Efisiensi	16
Tabel 2. 2 Rasio Pertumbuhan PAD	21
Tabel 2. 3 Tipe Opini Modifikasi.....	28
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 2. 5 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3. 1 Rasio Efisiensi Keuangan daerah.....	67
Tabel 3. 2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	67
Tabel 3. 3 Rasio Target PAD	68
Tabel 3. 4 Rasio Pertumbuhan PAD	69
Tabel 3. 5 Skala Nilai Opini Audit.....	69
Tabel 3. 6 Rasio Dana Perimbangan	70
Tabel 3. 7 Rasio Belanja Modal.....	70
Tabel 3. 8 Ringkasan Variabel dan Indikator	71
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif.....	80
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas	83
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas	84
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	85
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test	86
Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Persamaan Regresi untuk Kinerja Keuangan (Y)	87
Tabel 4. 7 Hasil Uji F	89
Tabel 4. 8 Hasil Uji t	90
Tabel 4. 9 Hasil Uji R ²	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	57
Gambar 4. 1 Hasil Uji Scatterplot pada Kinerja Keuangan (Y).....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat telah menyerahkan kebebasan berupa hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom terhadap pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan penduduk/masyarakat setempat secara mandiri pada Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menggambarkan pengertian dari Otonomi Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tentang Peraturan Daerah. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk mempercepat perkembangan ekonomi serta pembangunan di daerah, meminimalisir ketimpangan tiap wilayah, serta meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik sehingga dapat memenuhi kebutuhan, potensi, serta karakteristik yang terdapat di setiap wilayah (Septariani & Asoka, 2022). Otonomi daerah membuka peluang pemerintah daerah untuk mengurus, mengelola serta melakukan pembaharuan sistem keuangan pemerintah daerah yang berorientasi pada publik. Oleh karena itu, kesejahteraan keuangan daerah menjadi tanggung jawab langsung pemerintah daerah itu sendiri.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai kekuasaan atau kewenangan secara leluasa dalam mengurus

urusan pemerintahannya sendiri yang terdiri dari perencanaan, Pembangunan, pengendalian, serta evaluasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib lebih fokus untuk memberikan perhatian lebih untuk fokus memajukan kinerja pemerintah daerah serta keuangannya. Wujud dari terciptanya kesejahteraan masyarakat daerah dapat dilihat dari pemerintah daerah yang memiliki kondisi keuangan yang berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dari kondisi Pendapatan Asli Daerah, namun perlu diiringi pula dengan pengelolaan keuangan daerah yang memadai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari menggali potensi serta sumber daya daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Oleh karena itu untuk mendapatkan PAD yang optimal, perlu dilakukan strategi yang diawali dengan penetapan target. Penetapan target PAD atau yang sering disebut dalam dunia pemerintahan yaitu penyusunan anggaran perlu dilakukan secara realistis dan penuh pertimbangan. Penyusunan anggaran PAD yang tepat akan membuka peluang lebih dalam memaksimalkan potensi sumber daya milik pemerintah daerah untuk menghasilkan PAD, sehingga akan menambah kesejahteraan pemerintah daerah tersebut.

Target PAD yang terpenuhi menandakan pemerintah mampu untuk memprediksi perekonomian di masa depan. Realisasi PAD yang didapatkan oleh pemerintah daerah, merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di pemerintah daerah tersebut. Setiap pemerintah daerah mempunyai motivasi untuk terus meningkatkan PAD nya setiap tahun. Dengan semakin meningkatnya PAD setiap tahun, menandakan berhasilnya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD di wilayahnya. Hal tersebut tidak

terlepas dari cermatnya pemerintah daerah dalam menganggarkan PAD pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan PAD setiap tahunnya kearah yang lebih positif, menunjang semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah juga memiliki pendanaan yang bersumber dari pemerintah yaitu Dana Perimbangan. Salah satu sumber penerimaan daerah yang berkontribusi besar terhadap struktur APBD adalah dana perimbangan, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan berasal dari pendapatan APBN. Dengan keberadaan Dana Perimbangan, diharapkan dapat mengurangi perbedaan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal. Selain itu, diharapkan bahwa alokasi Dana Perimbangan akan membantu pemerintah daerah mengoptimalkan potensi ekonomi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Andirfa (2016) belanja modal merupakan salah satu belanja yang mampu berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya biasanya berlangsung lebih dari satu tahun anggaran dan akan meningkatkan aset atau kekayaan pemerintah, yang selanjutnya akan berdampak pada anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Belanja modal menggambarkan strategi pemerintah dalam jangka Panjang untuk mengoptimalkan kemakmuran daerahnya. Belanja modal yang terdiri dari Gedung dan bangunan; jalan, jembatan; dan irigasi; kendaraan; dan peralatan lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun akan dimanfaatkan

pemerintah dalam meningkatkan pelayanan Masyarakat dan mengoptimalkan PAD. Dengan berkembangnya, pembangunan infrastruktur umum merupakan investasi modal yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.. Seiring dengan perkembangan infrastruktur di berbagai wilayah, kegiatan investasi di daerah tersebut dapat meningkat. Dampak dari pertumbuhan pendapatan daerah dari waktu ke waktu akan mendorong perekonomian lokal untuk terus berkembang dan meningkat, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pada era otonom ini, pemerintah daerah didesak masyarakat agar mengupdate informasi yang transparan dan akuntabel terhadap laporan keuangan. Untuk mewujudkan tuntutan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang berlandaskan pada standar yang berlaku serta menyampaikannya ke publik. Dengan adanya pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah tersebut diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menerapkan dan menaatinya dalam mengelola keuangan secara transparan serta akuntabel, sehingga memberikan keyakinan lebih masyarakat terhadap kinerja pemerintah untuk mengelola keuangan daerah. Dalam menjamin keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah, karena itu pengawasan dan pemeriksaan yang tepat dan akurat diperlukan sesuai dengan peraturan.. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh lembaga berwenang, yakni BPK RI.

Berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dijelaskan bahwa BPK RI merupakan Lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan kewajiban keuangan negara. BPK RI merupakan lembaga dengan sifat yang independen serta

terpisah dari pemerintah atau bisa disebut dengan pemeriksa eksternal pemerintah, dengan tujuan agar pemeriksaan dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 juga disebutkan bahwa pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, serta evaluasi yang dilaksanakan dengan independen, objektif, serta profesional sesuai standar pemeriksaan, hal tersebut digunakan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, serta keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Setelah melakukan pemeriksaan, BPK RI menghasilkan output dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi opini serta temuan sebagai pernyataan professional mengenai wajarnya informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Opini dan temuan tersebut berhubungan dengan laporan keuangan daerah yang menjadi bahan pemerintah daerah untuk mengevaluasi laporan keuangannya. Diharapkan dari Opini yang diberikan BPK RI dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi semakin baik.

Laporan keuangan yang dipublikasikan harus dilakukan secara terbuka serta menjamin akuratnya informasi yang diberikan sehingga pengguna laporan keuangan mudah untuk memahaminya (Rahim et al., 2020). Melalui laporan keuangan pemerintah, masyarakat, dan pengguna laporan keuangan dapat lebih mudah dalam menerima informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah dalam hal tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi, seperti yang digambarkan dalam strategi perencanaan organisasi.

Sebagai upaya guna menjaga konsistensi pemerintah melaporkan keuangannya yang sesuai standar serta untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, maka diperlukan adanya evaluasi kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menjadikan bahwa tolak ukur untuk menetapkan kebijakan keuangan di tahun selanjutnya. Apabila kinerja keuangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai standar maka akan berakibat baik juga dalam hal pengendalian keuangannya, baik dalam hal pengendalian pendapatan maupun belanjanya yang dilakukan oleh daerah tersebut. Maka dari itu, kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki urgensi untuk diteliti karena akan berdampak bagi pemerintah daerah dan para pengguna lainnya yang memerlukan informasi mengenai hal ini. Dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan, dapat dilakukan analisis rasio Efisiensi. Menurut Fathah (2017) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dan pendapatan yang diterima. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan untuk kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya.

Berdasarkan data APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, realisasi PAD di beberapa Kota di Jawa Tengah mengalami kemunduran dalam pertumbuhan PAD nya. Seharusnya peristiwa tersebut menjadikan dana perimbangan dari

pemerintah pusat meningkat untuk menunjang perekonomian pemerintah daerah agar berjalan dengan baik. Namun mengalami kenaikan pada belanja modalnya. Contohnya pada tahun 2017, Kota Semarang mengalami penurunan pertumbuhan PAD sebesar 4%. Kemunduran tersebut tidak selaras dengan belanja modal yang mengalami kenaikan pada tahun tersebut. Namun dana perimbangan yang diterima Kota Semarang pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan. Dampak dari kejadian tersebut mengakibatkan penurunan efisiensi kinerja keuangan Kota Semarang. Salah satu masalah lain dengan pengelolaan keuangan daerah adalah persentase dana yang digunakan untuk belanja modal yang rendah. Berdasarkan APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2023 rata-rata dana yang digunakan untuk belanja modal hanya mencapai 19,49%. Angka ini bahkan jauh di bawah target yaitu 30%, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja operasi, terutama belanja gaji pegawai, belanja barang, dan belanja hibah. Terdapat ketidakselarasan antara hasil opini audit BPK dengan pertumbuhan PAD, dimana Kota Pekalongan mengalami penurunan pertumbuhan PAD namun mendapatkan opini audit WTP dengan kinerja keuangan yang baik.

Berdasarkan fenomena tersebut, membuat peneliti tertarik untuk membahas pengaruh Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Opini BPK RI tahun sebelumnya terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal tersebut juga didukung dengan tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu. Pada variabel Target PAD dan pertumbuhan PAD yang diteliti

oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu (Syifa Fatimah et al., 2023; Az Zahrah et al., 2024; Bilqis & Priyono, 2023; Ginting et al., 2023; Padang & Padang, 2023; S. P. Putri & Ratnawati, 2023) telah membuktikan Target Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan PAD memiliki dampak yang positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut tidak selaras dengan penelitian terhadap kinerja (Azhar, 2021; Lestari & Hapsari, 2020; Pratama et al., 2022; Rohyana & Rozaq, 2022; Satria & Sari, 2018) bahwa Target PAD dan Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Untuk variabel Opini audit BPK RI terdapat juga penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, hal ini selaras dengan penelitian (Az Zahrah et al., 2024; Satria & Sari, 2018; Suandani & Astawa, 2021). Namun pada penelitian (Insani et al., 2023; Lestari & Hapsari, 2020b; Nasution et al., 2023) bahwa opini audit tidak berpengaruh pada kinerja keuangan. Pada variabel dana perimbangan terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, hal ini selaras dengan penelitian (Maulina et al., (2021) Insani et al., (2023), Verawaty et al., 2020) Namun pada penelitian (Padang & Padang, 2023; S. P. Putri & Ratnawati, 2023) bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh pada kinerja keuangan. Untuk variabel terakhir yaitu belanja modal, terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, hal ini selaras dengan penelitian (Az Zahrah et al., (2024), Ginting et al., (2023), Insani et al., (2023), Lestari & Hapsari, (2020)). Namun pada penelitian (Bilqis & Priyono, 2023; Maulina et al., 2021; Padang & Padang, 2023)

bahwa belanja modal tidak berpengaruh pada kinerja keuangan Berdasarkan hal yang dijelaskan diatas, peneliti tertarik menganalisa sejauh mana pengaruh Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PAD, Opini Audit tahun sebelumnya, Dana Perimbangan, dan Belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah yang dinilai dengan memanfaatkan teori rasio keuangan. Pada penelitian ini, terdapat pembaharuan dari penelitian sebelumnya, yaitu peneliti menggunakan variabel target PAD, pertumbuhan PAD, dan opini tahun sebelumnya sebagai variabel independen. Pemilihan data dengan periode 10 tahun dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 didasari oleh alasan penting yaitu di tahun tersebut terdapat variasi opini audit yang signifikan, dimana beberapa pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, peneliti mengajukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Target PAD, Pertumbuhan PAD, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Dan Perimbangan, Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”** (Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014 sampai dengan 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang ditemukan berdasarkan fenomena dan gap penelitian dari penjelasan latar belakang di atas adalah tidak semua pemerintah daerah yang sukses dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan diiringi kenaikan pertumbuhan PAD dan dana perimbangan, memiliki kinerja keuangan yang buruk. Ukuran kinerja yang digunakan yaitu rasio efisiensi. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menandakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin

baik. Oleh karena itu penelitian ini hendak menguji beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Target Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh Target Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk dapat mengetahui pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk dapat mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah.

5. Untuk dapat mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada akuntansi sektor publik khususnya terkait kinerja keuangan pemerintah daerah.
 - b. Dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik tentang pengaruh Target PAD, Pertumbuhan PAD, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Dan Perimbangan, Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademisi

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi pembandingan yang akan datang untuk pengembangan dengan melakukan penelitian lebih lanjut.

- b. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk responden yaitu Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai gambaran mengenai Target PAD, Pertumbuhan PAD, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Dan Perimbangan, Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan keagenan antara *principal* dan *agent* yang diartikan sebagai kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) (Jensen et al., 1976). Pihak *principal* berperan memberikan wewenang dan pihak *agen* berperan sebagai penerima wewenang. Diharapkan pihak *agen* melaksanakan perintah sesuai harapan dari pihak (*prinsipal*). Teori ini dapat dilaksanakan di sektor publik. Negara demokrasi menerapkan teori keagenan yaitu adanya ikatan antara masyarakat (sebagai *principal*) dengan pemerintah (sebagai *agen*). Dalam pembahasan ini pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, yang artinya pemerintah daerah diberi kebebasan mengatur dan mengelola pemerintahan daerah dengan mandiri. Tanggung jawab tersebut memaksa pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan Masyarakat, hal tersebut tercapai bila pemerintah daerah mempunyai kondisi keuangan yang baik (Ditasari & Sudrajat, (2020). Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dari kondisi Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan PAD. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui strategi yang telah disusun. Strategi tersebut menghasilkan target PAD yang disebut

dengan anggaran PAD, yang nantinya menjadi acuan pemerintah daerah pada tahun berjalan untuk mencapai target PAD atau bahkan sampai melebihi target PAD. Selain itu, peran pemerintah daerah selain menetapkan target PAD yang realistis, perlu meningkatkan PAD setiap tahunnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun pemerintah daerah diberi wewenang otonomi daerah, pemerintah pusat tidak luput ikut serta dalam menunjang perekonomian daerah dengan memberikan dana perimbangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari berbagai sumber, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana tersebut untuk belanja yang tepat sasaran dan dikelola dengan baik. Salah satu belanja yang dimaksud ialah, belanja modal yang berperan penting dalam menunjang fasilitas pelayanan publik guna kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana belanja modal yang berkualitas mampu memberikan rasa aman untuk masyarakat dan dapat menggali potensi PAD. Realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah tidak lepas dari pengelolaan keuangan daerah yang memadai.

Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa pemerintah sebagai agen berkewajiban mengelola pemerintahan secara transparan, serta menginformasikan pelaporan dan pengungkapan kegiatan pemerintahan kepada pihak prinsipal atau masyarakat. Terdapat permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya asimetris informasi yang dapat mengakibatkan timbulnya penyimpangan salah satunya yang berkaitan dengan korupsi yang rawan dilakukan oleh pemerintah sebagai agen. Oleh karena itu, agen yaitu pemerintah wajib menyelenggarakan pemerintahan dengan transparan dan memberikan pertanggungjawaban dalam mengelola sumber

daya yang tergambar dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk menilai kesesuaian pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sudah sesuai peraturan, maka perlunya pengawasan yang dapat dilakukan salah satunya dengan diperiksanya oleh BPK RI. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara, bahwa negara menugaskan BPK RI sebagai pemeriksa LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap keuangan, kinerja, dan lainnya dengan hasil berupa opini audit, temuan audit, kesimpulan, serta rekomendasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur kualitas kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan salah satunya pada pengelolaan keuangan.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kinerja Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menjelaskan bahwa kinerja merupakan Keluaran/Hasil atas Program/Kegiatan yang direncanakan untuk dicapai atau yang telah tercapai terkait pemanfaatan anggaran dengan ukuran yang jelas dan hasil yang dapat diukur. Kinerja keuangan menjelaskan terkait kemahiran suatu perusahaan dalam manajemen serta mengontrol sumber daya yang mereka miliki (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018). Kinerja keuangan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dari perusahaan dalam mengelola modalnya secara efektif, efisien, dan bertujuan untuk memperoleh tujuan tersebut secara maksimal. Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa kinerja keuangan

merupakan hasil dari pengelolaan perusahaan mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki perusahaan tersebut.

Menurut (Nengsih, 2021) mengukur kinerja keuangan dapat dilakukan melalui pengukuran dan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan perhitungan rasio. Rasio keuangan berfungsi untuk analisis perbandingan antar perusahaan yang berbeda dengan rasio yang sama dan sebagai bentuk investigasi dan perbandingan informasi keuangan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah membuktikan capaian kinerja pemerintahan dalam aspek keuangan daerah yang berisi penerimaan dan belanja daerah dalam satu periode anggaran. Dari penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah yang berbunyi bahwa kinerja keuangan berguna untuk mendapatkan hasil kinerja dari layanan yang telah diberikan (rentabilitas), untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas), kewajibannya (solvabilitas) serta kemampuan dalam menerima imbalan atas jasa layanan yang telah dilakukan untuk membiayai pengeluaran. Analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat dilakukan dengan rasio efisiensi.

2.2.1.1 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan pendapatan yang diterima (Fathah, 2017). Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang secermat mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya, akan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi anggaran (Trianto, 2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan pendapatan dan menerima pendapatan yang sebenarnya. Pada saat Pemerintah Daerah mengumpulkan pendapatan, kategori kinerja keuangannya akan dianggap efisien apabila, rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah yang lebih kecil menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik jika nilainya kurang dari satu atau di bawah seratus persen. Akibatnya, pemerintah daerah harus menghitung dengan teliti berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan seluruh pendapatannya.. Hal ini penting untuk mengetahui apakah kegiatan pengumpulan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:.

Tabel 2. 1 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi =	$\frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan daerah}} \times 100\%$
-------------------	---

Sumber: (Fathah, 2017)

2.2.2 Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga dikenal sebagai APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Pemerintah daerah dalam menyusun APBD bertujuan untuk:

- a. membagi uang sesuai dengan keadaan keuangan & menjadwalkan pengeluaran yang tepat sesuai dengan pendapatan, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif & berkelanjutan sesuai dengan hukum.
- b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok daripada alokasi anggaran belanja penunjang yang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Target PAD adalah perkiraan jumlah pendapatan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Menetapkan target adalah hal yang penting karena dapat membantu mengukur seberapa baik kinerja keuangan dan efektivitas dalam mengelola sumber daya daerah. Meningkatkan target PAD tidak hanya untuk tambah uang daerah, tapi juga untuk dorong pembangunan dan layanan publik yang lebih baik. Dengan menaikkan jumlah PAD, diharapkan pemerintah

daerah bisa lebih mandiri dalam mendanai pembangunan tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup dengan menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang memadai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang diperoleh daerah yang keberadaanya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemungutan PAD telah diatur sesuai dasar hukum yang berlaku, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PERSERODA).

Penjelasan mengenai sumber PAD dijabarkan lebih lanjut seperti dibawah ini:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah diartikan sebagai suatu

kontribusi wajib yang harus terpenuhi oleh orang pribadi atau badan terhadap Daerah dengan sifat memaksa/mengikat berdasar dari Undang-Undang. Dalam memperoleh Pajak Daerah, Pemerintah Daerah tidak secara langsung mendapatkan imbalan dari pemungutan ini namun salah satu PAD tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan mementingkan kesejahteraan masyarakat.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah adalah pungutan atas jasa dan izin yang disediakan secara khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Retribusi daerah dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ialah pungutan dari pemerintah daerah terhadap layanan yang telah diberikannya dengan tujuan untuk mencapai tujuan manfaat dan kepentingan secara umum sekaligus dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha ialah pungutan dari pemerintah daerah terhadap pelayanan yang telah diberikannya dengan prinsip komersial yang meliputi:

- Suatu layanan yang diberikan melalui penggunaan kekayaan daerah yang belum dimaksimalkan;
- Suatu layanan yang dilakukan sepanjang belum tersedia pelayanan dari swasta yang memadai.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ialah pungutan dari pemerintah daerah terkait layanan berupa Izin khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada individu, badan, atau kelompok untuk mengatur dan mengawasi penggunaan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu dengan tujuan mempertahankan kepentingan masyarakat umum dan melestarikan lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ialah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah mulai dari kegiatan yang telah disusun serta tindakan yang terdiri dari perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penata usahannya.

4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah jenis pendapatan yang berguna untuk menampung seluruh penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

2.2.3 Pertumbuhan PAD

Menurut Kawatu (2019) Pertumbuhan pendapatan sangat penting untuk menentukan apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran mengalami peningkatan atau penurunan. Diinginkan bahwa pertumbuhan pendapatan positif dan mengalami peningkatan, jika terjadi pertumbuhan negatif berarti terjadi penurunan kinerja keuangan. Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan atau mempertahankan pertumbuhan pendapatan daerah ditunjukkan oleh rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah bergantung pada kemampuan untuk menemukan sumber-sumber keuangan yang dapat menghasilkan pendapatan. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menggunakan potensi yang dimiliki pemerintah daerah dengan sebaik mungkin dapat menghasilkan pendapatan asli daerah. Otonomi daerah harus memungkinkan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga mereka tidak tergantung pada dana pemerintah pusat.

Rasio ini menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat menjaga dan meningkatkan pencapaian mereka dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui bagaimana pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran meningkat, Anda dapat mengevaluasi peluang yang perlu diperhatikan. Cara menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rasio Pertumbuhan PAD

$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD}_t - \text{Realisasi PAD}_{t-1}}{\text{Realisasi PAD}_t} \times 100\%$
--

Sumber: (Fathah, 2017)

Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengevaluasi wilayah potensial yang perlu diprioritaskan. Jika Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal meningkat sementara Belanja Operasi menurun, maka pertumbuhannya positif, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut berhasil mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya. Sebaliknya, jika nilai TPD, PAD, dan Belanja Modal meningkat sementara Belanja Operasi menurun, pertumbuhannya akan negatif, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut belum dapat meningkatkan pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya.

2.2.4 Opini Audit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, Opini merupakan suatu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dijelaskan bahwa opini audit dapat diperoleh setelah melakukan pemeriksaan terhadap keuangan. Tujuannya untuk mendapatkan keyakinan yang memadai agar pemeriksa dapat memberikan opini secara yakin bahwa laporan keuangan disusun serta disajikan secara wajar terkait materialitasnya, kesesuaiannya terhadap standar akuntansi, kecukupan pengungkapannya, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kinerja sistem pengendalian intern. Selain memberikan opini audit, BPK RI juga memberikan saran yang disebut dengan rekomendasi. Dari penjelasan yang terdapat dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 rekomendasi merupakan saran yang

diungkapkan oleh pemeriksa pemeriksa atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya, yang dimaksudkan untuk orang dan/atau badan yang memiliki wewenang dalam melakukan Tindakan dan/atau perbaikan. Oleh karena itu, opini dari BPK RI berdasarkan hasil pemeriksaan ialah sesuatu yang berperan penting sebagai alat ukur penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan terdapat 4 jenis opini, diantaranya yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: opini yang diberikan oleh BPK memiliki arti bahwa laporan keuangan yang telah dilakukan pemeriksaan, telah dipastikan disajikan dengan wajar terkait seluruh hal yang bersifat material, hasil usaha, posisi keuangan, serta arus kas dari badan/entitas tertentu yang relevan sesuai pada standar dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Selain Opini Wajar Tanpa Pengecualian, terdapat Opini Wajar Tanpa pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal. Jenis opini audit satu ini menyatakan bahwa laporan keuangan tersusun sesuai standar dan tidak mengandung kejanggalan. Akan tetapi, auditor memberi catatan khusus berkaitan masa pengeluaran laporan keuangan tersebut, misalnya saat bencana alam, terjadi korupsi internal, kondisi pendapatan menurun, dan sebagainya.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: opini yang diberikan oleh BPK memiliki arti bahwa laporan keuangan yang telah dilakukan pemeriksaan, telah dijamin untuk dipresentasikan secara wajar

dalam semua aspek material, hasil usaha, posisi keuangan dan arus kas badan/entitas tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang digunakan di Indonesia, kecuali untuk efek yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pada jenis opini ini terdapat dua opini turunan dari jenis Opini WDP, yaitu Opini WDP karena pembatasan ruang lingkup dan Opini WDP karena adanya penyimpangan standar akuntansi.

Pada jenis Opini WDP karena pembatasan ruang lingkup, terdapat kalimat pada Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu “BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas”. Dan pada jenis karena adanya penyimpangan standar akuntansi, terdapat kalimat “Namun, hasil penilaian kembali tersebut belum disajikan dalam Neraca [NAMA ENTITAS] tanggal 31 Desember 20XX sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.”

3. Opini Tidak Wajar atau *adverse opinion*: opini yang diberikan oleh BPK memiliki arti bahwa laporan keuangan yang telah dilakukan pemeriksaan tidak tersaji secara wajar pada posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu berdasarkan pada prinsip akuntansi yang digunakan di Indonesia.
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): opini yang diberikan oleh BPK memiliki arti bahwa auditor tidak memberikan pendapatnya untuk laporan yang telah

diperiksanya apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak mencukupi untuk auditor menyampaikan suatu opini.

Pada Standar Audit (SA) 700 juga menjelaskan tentang jenis opini audit yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau disebut dengan Opini tanpa modifikasian merupakan Opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Institut Akuntansi Publik Indonesia, 2021). Untuk memperoleh opini ini, audit wajib mengevaluasi beberapa hal yaitu:

- Laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara tepat. Dalam membuat evaluasi ini, auditor harus mempertimbangkan relevansi kebijakan akuntansi dengan entitas, dan apakah kebijakan akuntansi tersebut telah disajikan dengan cara yang dapat dipahami;
- Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan tidak bertentangan dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat;
- Estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar

Terdapat SA 705 juga yang membahas mengenai opini modifikasi. Pada SA 705 menyebutkan hal-hal yang menjadi penyebab adanya modifikasi yaitu apakah laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material atau, dalam hal ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, kemungkinan mengandung kesalahan penyajian material; dan auditor mempertimbangkan seberapa pervasif dampaknya atau kemungkinan dampak hal-

hal tersebut terhadap laporan keuangan (Institut Akuntansi Publik Indonesia, 2021). Pada SA 705 ini, menjelaskan opini modifikasi yang terdiri dari 3 jenis opini, yaitu:

1. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP): Auditor mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.
2. Opini Tidak Wajar: Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, ketika pelaporan sesuai dengan kerangka penyajian wajar, laporan keuangan terlampir tidak menyajikan secara objektif sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; atau ketika pelaporan sesuai dengan kerangka kepatuhan, laporan keuangan terlampir tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku
3. Opini Tidak Menyatakan Pendapat: Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup, tepat dan banyak ketidakpastian yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material dan pervasif. auditor tidak dapat menyimpulkan suatu opini atas laporan keuangan yang disebabkan oleh interaksi yang potensial dari

ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.

Tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dapat muncul karena beberapa hal yaitu:

- a. Kondisi di luar pengendalian entitas: yaitu saat catatan akuntansi entitas telah musnah, dan catatan suatu komponen signifikan disita oleh otoritas pemerintah hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.
- b. Kondisi yang berkaitan dengan sifat atau saat dari pekerjaan auditor:
 - Entitas diharuskan untuk menggunakan metode akuntansi ekuitas untuk suatu entitas terasosiasi, dan auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang informasi keuangan entitas terasosiasi tersebut untuk mengevaluasi apakah metode ekuitas tersebut telah berlaku dengan tepat.
 - Saat penunjukan auditor menyebabkan auditor tidak dapat mengobservasi penghitungan fisik persediaan.
 - Auditor menentukan bahwa pelaksanaan prosedur substantif saja adalah tidak cukup, tetapi pengendalian entitas tidak efektif.
- c. Pembatasan yang dilakukan oleh manajemen:
 - Manajemen mencegah auditor untuk mengobservasi penghitungan fisik persediaan.
 - Manajemen mencegah auditor untuk melakukan konfirmasi eksternal atas saldo akun-akun spesifik.

Tabel 2. 3 Tipe Opini Modifikasi

Sifat hal-hal yang menyebabkan modifikasi opini	Pertimbangan auditor tentang seberapa pervasive dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan	
	Material tetapi tidak pervasif	Material dan pervasif
Laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak wajar
Ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak menyatakan pendapat

2.2.5 Dana Perimbangan

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022), Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari alokasi dana perimbangan adalah untuk mengurangi perbedaan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, diharapkan bahwa alokasi dana perimbangan akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mengeksplorasi potensi ekonomi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD dan kinerja. Suatu sistem yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien membagi kekayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan setiap daerah, serta jumlah dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan. Pendanaan untuk pelaksanaan desentralisasi berasal dari

Dana Perimbangan, yang alokasinya terkait satu sama lain. Jenis penerimaan ini saling melengkapi dan dimaksudkan untuk membantu menerapkan desentralisasi. Dengan mempertimbangkan potensi daerah penghasil, alokasi bagian daerah untuk pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam dibuat dengan mempertimbangkan potensi daerah penghasil.

Dana perimbangan terdiri dari bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk pemerataan, dengan mempertimbangkan potensi, luas, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi perbedaan antara daerah maju dan kurang berkembang. Dana Alokasi Khusus berkaitan dengan membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus Daerah. Oleh karena itu, tujuan utama dari dana perimbangan adalah untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dengan membuat sistem pendanaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (akuntabel).

2.2.6 Belanja Modal

Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019) tentang pengelolaan keuangan daerah, Belanja daerah adalah semua tanggung jawab pemerintah daerah yang dianggap sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran yang bersangkutan. Agar standar pelayanan minimal terpenuhi, belanja daerah

dialokasikan dengan memberikan prioritas pada pendanaan untuk urusan pemerintahan yang wajib dan pelayanan dasar. Klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019) meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2023) tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membeli atau menambah aset tetap atau aset lain yang memiliki manfaat ekonomis selama lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dan melebihi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lain yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal, menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk menambah modal dengan menambahkan aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal juga mencakup biaya pemeliharaan yang meningkatkan kapasitas dan kualitas aset serta mempertahankan atau meningkatkan masa manfaat aset. Belanja dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seperti berikut:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

a. Belanja Modal Tanah

Biaya yang terkait dengan pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan biaya administratif lainnya yang terkait dengan perolehan hak dan kewajiban ketika tanah dibebaskan atau dibayar ganti rugi setelah tanah digunakan.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Biaya yang diperlukan untuk membeli peralatan dan mesin yang digunakan dalam kegiatan termasuk biaya pembelian, transportasi, instalasi, dan biaya langsung lainnya. Ini juga termasuk biaya setelah peralatan dan mesin tersebut digunakan, seperti biaya tambahan setelah peralatan dan mesin tersebut layak untuk dikapitalisasi.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk mendapatkan bangunan bisa melalui kontrak atau swakelola, termasuk biaya pembelian atau konstruksi, biaya izin membangun, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam bulan ini, termasuk biaya setelah pembelian (pengeluaran berikutnya) gedung dan bangunan yang memenuhi syarat untuk diakumulasikan.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan jaringan.

Biaya untuk membangun jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan hingga siap digunakan termasuk biaya konstruksi dan biaya lainnya yang dikeluarkan hingga proyek tersebut siap digunakan. Biaya tambahan setelah perolehan, seperti biaya pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan yang dapat dikapitalisasi juga termasuk dalam pengeluaran.

e. Belanja Modal Lainnya

Biaya yang diperlukan untuk pembentukan modal untuk pengadaan atau pembangunan belanja modal lainnya, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan jalan, irigasi, dan lainnya. Dalam belanja modal termasuk:

- Kegiatan kontrak sewa beli (leasehold),
- Pengadaan/pembelian barang-barang kesenian,
- Barang-barang purbakala dan museum,
- Buku-buku dan jurnal ilmiah, serta
- Barang koleksi perpustakaan selama tidak untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Belanja modal lain mencakup belanja modal nonfisik yang jumlahnya dapat diidentifikasi dan diukur.

f. Belanja Modal BLU

Biaya untuk membeli aset atau barang lain yang digunakan dalam operasional BLU.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian dan Metode Analisis	Hasil Pengamatan
1.	Az Zahrah et al., (2024)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1 : Opini Audit</p> <p>X2 : Belanja Modal</p> <p>X3: PAD</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel:</p> <p>38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur</p> <p>Metode analisis:</p> <p>analisis deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Opini Audit berdampak positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3. Belanja Modal berdampak positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 4. Pada saat yang sama, Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, dan Belanja Modal semua berdampak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
2.	S. P. Putri & Ratnawati, (2023)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1:Pendapatan Asli daerah (PAD)</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan asli daerah sangat memengaruhi

		<p>X2:Dana Perimbangan X3 : SILPA</p> <p>Variabel Dependen (Y): Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel: 20 sampel dari 5 (lima) Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur</p> <p>Metode analisis: Software Eviews 12 meliputi analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t</p>	<p>kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dana Perimbangan sangat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, dan 3. SILPA tidak memengaruhi kinerja keuangan pemerintah.
3.	(Padang & Padang, 2023)	<p>Variabel Independen (X): X1:Pendapatan Asli daerah (PAD) X2:Dana Perimbangan X3 : Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan asli daerah sangat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah 2. Dana Perimbangan sangat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah 3. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap

		<p>Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel:</p> <p>264 sampel dari</p> <p>33 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Metode analisis:</p> <p>regresi data panel dengan Eviews 7 dan, analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t</p>	<p>kinerja keuangan pemerintah.</p>
4.	Ginting et al., (2023)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1: Pendapatan Asli daerah (PAD)</p> <p>X2: Dana Alokasi Umum</p> <p>X3 : Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel:</p> <p>kabupaten/kota pada Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan asli daerah dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan 2. Dana alokasi umum tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

		<p>Metode analisis:</p> <p>Metode analisis Deskripsi</p>	
5.	Insani et al., (2023)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1:Pendapatan Asli daerah (PAD) X2:Dana Perimbangan X3:Pertumbuhan Ekonomi X4 :Opini Audit</p> <p>Variabel Dependen (Y): Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel:</p> <p>33 sampel pada 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi</p> <p>Metode analisis: analisis regresi linear berganda</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi positif oleh pendapatan asli daerah. 2. Dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan opini audit tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6.	Nasution et al., (2023)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1 : Opini Audit X2 : Good Corporate Governance X3 : Return Saham X4 : ketepatan Waktu</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opini audit dan return saham tidak mempengaruhi kinerja keuangan secara parsial 2. good corporate governance mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan.

		<p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel:</p> <p>13 perusahaan di bidang keuangan</p> <p>Metode analisis:</p> <p>analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji Koefisien Determinasi</p>	
7.	(Bilqis & Priyono, 2023) 2023)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1: Pendapatan Asli daerah (PAD)</p> <p>X2: Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel:</p> <p>kabupaten/kota pada Provinsi Jawa</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. 2. Belanja Modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

		<p>Tengah,Metode analisis:</p> <p>analisis linier berganda</p>	
8.	Pratama et al., (2022)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1 : Opini Audit</p> <p>X2 : PAD</p> <p>X3 : Intergovernmental Revenue</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel:</p> <p>87 LHP Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2019.</p> <p>Metode analisis:</p> <p>analisis statistik deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opini Audit BPK tidak dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda. 2. PAD dapat mempengaruhi signifikan negatif pada Kinerja Keuangan Pemda. 3. Intergovernmental Revenue dapat mempengaruhi signifikan pada Kinerja Keuangan Pemda
9.	(Rohyana & Rozaq, 2022)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1 : Pertumbuhan PAD</p> <p>X2 : Pertumbuhan Belanja Modal</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan PAD tidak dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda. 2. Pertumbuhan Belanja Modal tidak dapat

		<p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel:</p> <p>36 sampel.</p> <p>Metode analisis:</p> <p>Analisis Regresi Linier Berganda, Analisis Koefisien Determinasi, Uji t dan Uji f</p>	mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda
10.	Azhar, (2021)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1: Pendapatan Asli daerah (PAD)</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel:</p> <p>laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa tahun 2011 sampai dengan tahun 2020</p> <p>Metode analisis:</p> <p>analisis regresi linier sederhana</p>	<p>Hasil Penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah.

11.	Maulina et al., (2021)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1:Pendapatan Asli daerah (PAD)</p> <p>X2:Dana Perimbangan</p> <p>X3 : Belanja Modal</p> <p>X4:Ukuran Pemerintah Daerah</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel:</p> <p>33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Metode analisis:</p> <p>analisis regresi berganda menggunakan aplikasi STATA (Statistik/Data Analysis) versi 16</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan. 2. Ukuran belanja modal pemerintah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara tidak signifikan.
12.	(Verawaty et al., 2020)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1:Pendapatan Asli daerah (PAD)</p> <p>X2:Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <p>Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan</p>

		<p>Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel: 48 sampel, kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014-2016</p> <p>Metode analisis:</p> <p>Analisis regresi linear berganda</p>	
13.	Lestari & Hapsari, (2020)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1 :Pendapatan Asli daerah (PAD)</p> <p>X2 : Belanja Modal</p> <p>X3 : Opini Audit</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel: 30 sampel dari</p> <p>Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta</p> <p>Metode analisis:</p> <p>analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS 24.</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opini Audit dan Pendapatan Asli Daerah tidak berdampak besar pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Belanja Modal berdampak besar pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

14.	N. K. N. I. Putri & Darmayanti, (2019)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1: Pendapatan Asli daerah (PAD)</p> <p>X2: Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kinerja Keuangan</p> <p>Sampel: 20 sampel dari</p> <p>Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan (wilayah Sarbagita)</p> <p>Metode analisis:</p> <p>Analisis regresi linear berganda</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <p>Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terpengaruh oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan..</p>
15.	(Antari & Sedana, 2018)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1: Pendapatan Asli daerah (PAD)</p> <p>X2 : Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah 2. Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

		<p>Sampel:</p> <p>seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali</p> <p>Metode analisis:</p> <p>analisis regresi linier berganda, analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t</p>	
--	--	--	--

Tabel 2. 5 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Az Zahrah et al., (2024)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan. 2. Variabel independent yang digunakan yaitu Belanja Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi. 2. Lokasi penelitian penelitian terdahulu di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian saat ini di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2018-2021, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023.

			<p>4. Penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio Kemandirian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan rasio efisiensi.</p> <p>5. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Opini Tahun sebelumnya, Dana Perimbangan.</p>
2.	S. P. Putri & Ratnawati, (2023)	<p>1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan.</p> <p>2. Salah satu variabel Independen yang digunakan sama yaitu Dana Perimbangan</p>	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi.</p> <p>2. Lokasi penelitian penelitian terdahulu di Kota/Kabupaten di wilayah Gerbangkertasusila, sedangkan penelitian saat ini di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.</p> <p>3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2018-2021, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023.</p> <p>4. Penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan rasio Efisiensi</p> <p>5. Penelitian terdahulu tidak menggunakan</p>

			variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Opini Tahun sebelumnya.
3.	(Padang & Padang, 2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan. 2. Variabel Independen yang digunakan sama yaitu Dana Perimbangan dan Belanja Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi. 2. Lokasi penelitian penelitian terdahulu di Kota/Kabupaten di wilayah Sumatera Utara, sedangkan penelitian saat ini di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2016-2021, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023. 4. Penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan rasio Efisiensi 5. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PAD, Opini Tahun sebelumnya.
4.	Ginting et al., (2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan. 2. Variabel Independen yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi. 2. Lokasi penelitian penelitian terdahulu di Kota/Kabupaten di

		<p>digunakan sama yaitu Dana Perimbangan dan Belanja Modal</p> <p>3. Menggunakan rasio efisiensi</p>	<p>Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penelitian saat ini di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.</p> <p>3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2017-2021, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023.</p> <p>4. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PAD, Opini Tahun sebelumnya.</p>
4.	Insani et al., (2023)	<p>1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan.</p> <p>2. Variabel Independen yang digunakan sama yaitu Dana Perimbangan dan Belanja Modal</p>	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi.</p> <p>2. Lokasi penelitian penelitian terdahulu di Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi, sedangkan penelitian saat ini di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.</p> <p>3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan tahun 2021, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2017-2022.</p> <p>4. Penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan rasio keserasian.</p>

			5. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PAD, Opini Tahun sebelumnya.
6.	Nasution et al., (2023)	1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi. 2. Lokasi penelitian penelitian terdahulu menggunakan data dari BEI, sedangkan penelitian saat ini menggunakan laporan keuangan di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2012-2021, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023. 4. Penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio ROA (<i>Retrun of Aset</i>), sedangkan penelitian saat ini menggunakan rasio Efisiensi. 5. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal.

7.	(Bilqis & Priyono, 2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan. 2. Variabel independent yang digunakan sama yaitu Belanja Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi. 2. Lokasi penelitian penelitian terdahulu menggunakan data di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan penelitian saat ini menggunakan laporan keuangan di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, 3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2015-2020, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023. 4. Penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan rasio Efisiensi. 5. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PAD, Dana Perimbangan, opini audit tahun sebelumnya
8.	Pratama et al., (2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi. 2. Lokasi penelitian penelitian terdahulu menggunakan laporan

			<p>keuangan Kabupaten di Jawa Timur, sedangkan penelitian saat ini menggunakan laporan keuangan di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.</p> <p>3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2017-2019, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023.</p> <p>4. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PAD, Dana Perimbangan, opini audit tahun sebelumnya, dan belanja modal</p>
9.	(Rohyana & Rozaq, 2022) 2022)	1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan.	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi.</p> <p>2. Lokasi penelitian penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian saat ini menggunakan laporan keuangan di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.</p> <p>3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2017-2019, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023.</p>

			<p>4. Penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio pertumbuhan sedangkan penelitian saat ini menggunakan rasio Efisiensi.</p> <p>5. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, opini audit tahun sebelumnya, dan belanja modal</p>
10.	Azhar, (2021)	<p>1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan.</p> <p>2. Variabel Independen yang digunakan sama yaitu Pendapatan Asli Daerah.</p>	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi.</p> <p>2. Lokasi penelitian terdahulu di Kota Langsa sedangkan penelitian saat ini di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.</p> <p>3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2011-2020, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023.</p> <p>4. Penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio efisiensi, sedangkan penelitian saat ini menggunakan rasio Efisiensi</p> <p>5. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target</p>

			Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, opini audit tahun sebelumnya, dan belanja modal.
11.	Maulina et al., (2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan. 2. Variabel Independen yang digunakan sama yaitu Dana Perimbangan, Belanja Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi. 2. Lokasi penelitian penelitian terdahulu di 33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara sedangkan penelitian saat ini di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2014-2018, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023. 4. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PADa, opini audit tahun sebelumnya.
12	(Verawaty et al., 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan. 2. Variabel Independen yang digunakan sama yaitu Dana Perimbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi. 2. Lokasi penelitian penelitian terdahulu di Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan sedangkan penelitian saat ini di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan

			<p>keuangan periode 2014-2016, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023.</p> <p>4. Penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio Kemandirian sedangkan penelitian saat ini menggunakan rasio Efisiensi</p> <p>5. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PAD, opini audit tahun sebelumnya, dan belanja modal.</p>
13.	Lestari & Hapsari, (2020)	<p>1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan.</p> <p>2. Salah satu variabel Independen yang digunakan sama yaitu Belanja Modal</p>	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi.</p> <p>2. Lokasi penelitian penelitian terdahulu di Kabupaten/Kota Provinsi D.I.Yogyakarta, sedangkan penelitian saat ini di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.</p> <p>3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2013-2018, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023.</p> <p>4. Penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio Efektivitas, sedangkan</p>

			<p>penelitian saat ini menggunakan rasio Efisiensi.</p> <p>5. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PAD, opini audit tahun sebelumnya, dan dana perimbangan</p>
14	N. K. N. I. Putri & Darmayanti, (2019)	<p>1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan.</p> <p>2. Salah satu variabel Independen yang digunakan sama yaitu Dana Perimbangan</p>	<p>1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi.</p> <p>2. Lokasi penelitian terdahulu di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, sedangkan penelitian saat ini di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.</p> <p>3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2012-2016, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023.</p> <p>4. Penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio pertumbuhan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan rasio Efisiensi.</p> <p>5. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PAD, opini audit tahun sebelumnya, dan belanja modal</p>

15	(Antari & Sedana, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu Kinerja Keuangan. 2. Salah satu variabel Independen yang digunakan sama yaitu belanja modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu merupakan jurnal, sedangkan penelitian saat ini adalah skripsi. 2. Lokasi penelitian terdahulu di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, sedangkan penelitian saat ini di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2011-2015, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2014-2023. 4. Penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio pertumbuhan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan rasio Efisiensi. 5. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PAD, opini audit tahun sebelumnya, dan dana perimbangan
----	-------------------------	---	--

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian yaitu suatu gambaran yang berkaitan dengan pola hubungan antar variabel. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya pemerintah daerah dituntut oleh masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan mengoptimalkan pendapatan pemerintah daerah untuk

membiyai perekonomian pemerintah daerah. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu, pertama mengoptimalkan PAD dengan cara membuat strategi yang diawali dengan penetapan target. Penyusunan anggaran PAD yang tepat akan membuka peluang lebih dalam menggali potensi PAD yang ada di pemerintah daerah, sehingga akan menambah kesejahteraan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan performa PAD dengan memperhatikan pertumbuhan PAD setiap tahunnya. Selain PAD, demi menjamin kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah juga mendapatkan dana dari pemerintah pusat yang disebut dana perimbangan. Dana Perimbangan diharapkan dapat mengurangi perbedaan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal. Selain itu, diharapkan bahwa alokasi Dana Perimbangan akan membantu pemerintah daerah mengoptimalkan potensi ekonomi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Setelah pemerintah daerah mendapatkan pendapatan dari berbagai sumber, dana tersebut akan dibelanjakan untuk menunjang perekonomian dan pelayanan publik. Salah satu belanja yang mampu berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian suatu daerah yaitu belanja modal. Belanja modal yang terdiri dari Gedung dan bangunan; jalan, jembatan; dan irigasi; kendaraan; dan peralatan lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun akan dimanfaatkan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan Masyarakat dan mengoptimalkan PAD. Dengan berkembangnya Pembangunan infrastruktur di berupa fasilitas umum merupakan kegiatan belanja modal yang dapat menghasilkan sumber-sumber pendapatan

daerah. Seiring dengan perkembangan infrastruktur di berbagai wilayah, kegiatan investasi di daerah tersebut dapat meningkat.

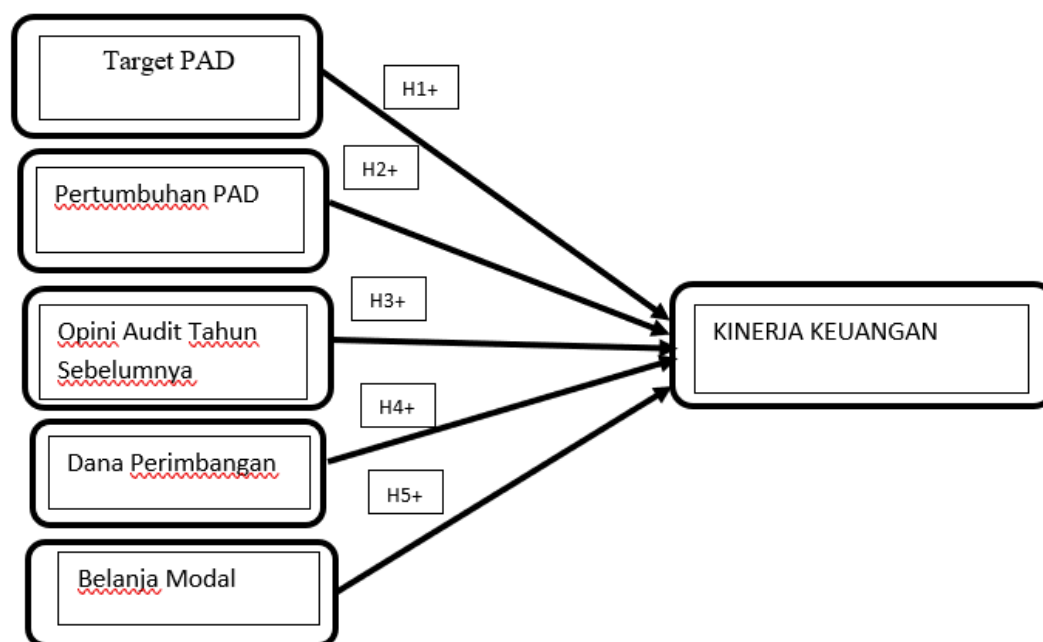
Setelah melakukan seluruh aktivitas pemerintahan terutama pengelolaan keuangan, pemerintah daerah wajib memberikan informasi yang memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi terhadap laporan keuangan. Untuk mewujudkan tuntutan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun serta menyampaikan laporan keuangan berdasarkan pada standar yang berlaku. Dengan adanya Masyarakat yang ikut mengawasi bagus tidaknya kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, maka pemerintah daerah wajib meningkatkan keyakinan masyarakat terkait pengelolaan keuangan disertai dengan menjaga konsistensi pemerintah dalam melakukan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada standar yang berlaku guna menilai kinerja pemerintah daerah.

Analisis rasio keuangan dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk mengukur rasio keuangan pada laporan keuangan media ukur yang digunakan yaitu Rasio Efisiensi, yang menunjukkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dan pendapatan yang diterima (2017, Rigel Nurul Fathaha). Pada saat Pemerintah Daerah mengumpulkan pendapatan, kategori kinerja keuangannya akan dianggap efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menandakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghitung dengan teliti berapa biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan seluruh pendapatannya. Hal ini penting untuk mengetahui apakah kegiatan pengumpulan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

PAD yang semakin tinggi menandakan semakin baik pemerintah dalam mengatur kinerja keuangan pemerintah. Terdapat alat ukur lain untuk mengukur baik buruknya kinerja keuangan pemerintah yaitu bisa dilihat dari opini audit disampaikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini audit yang baik diberikan kepada pemerintah daerah, maka menunjukkan baiknya kinerja keuangan pemerintah tersebut.

Dari uraian tersebut maka digambar kerangka pemikiran hubungan antara variabel Target PAD, Pertumbuhan PAD, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dengan variabel kinerja keuangan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.5 Kerangka Penelitian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Target PAD adalah perkiraan jumlah pendapatan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Menetapkan target adalah hal yang penting karena dapat membantu mengukur seberapa baik kinerja keuangan dan efektivitas dalam mengelola sumber daya daerah. Meningkatkan target PAD tidak hanya untuk tambah uang daerah, tapi juga untuk dorong pembangunan dan layanan publik yang lebih baik. Penetapan target pendapatan asli daerah (PAD) yang realistis dan terukur diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, semakin bagus perencanaan dan mencapai target PAD, semakin bagus juga kinerja keuangan yang terlihat dalam pengelolaan anggaran dan pembiayaan daerah. Apabila pemerintah daerah menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi namun tidak didukung dengan kemampuan pengelolaan yang cukup, maka dapat berdampak pada ketidakstabilan dalam mencapai kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, dengan mengangkat target Pendapatan Asli Daerah yang realistis dan dapat dicapai, maka dapat menciptakan stabilitas keuangan daerah, memperbaiki pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kemampuan fiskal untuk mendukung pembangunan daerah.

Adanya penelitian dari (Az Zahrah et al., 2024; Padang & Padang, 2023) yang menyatakan bahwa Target Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menjadikan Target Pendapatan Asli Daerah

menjadi salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1 : Target Pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.5.2 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kawatu (2019) Pertumbuhan pendapatan sangat penting untuk menentukan apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran mengalami peningkatan atau penurunan. Diinginkan bahwa pertumbuhan pendapatan positif dan mengalami peningkatan, jika terjadi pertumbuhan negatif berarti terjadi penurunan kinerja keuangan. Jika penerimaan PAD oleh pemerintah daerah naik setiap tahun, maka anggaran untuk investasi publik, infrastruktur, dan program pembangunan akan meningkat. Pertumbuhan PAD yang stabil dan konsisten menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya dengan baik, sehingga kinerja keuangan daerah meningkat.

Adanya penelitian dari (Bilqis & Priyono, 2023; Ginting et al., 2023) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menjadikan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2 : Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.5.3 Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

Untuk menjamin konsistensi pemerintah dalam membuat laporan keuangan sesuai standar, maka diperlukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang berkualitas baik. BPK RI yang telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah daerah menghasilkan output yang disebut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Di dalam LHP berisi opini dan temuan sebagai pernyataan professional terkait wajar tidaknya informasi yang tersaji di laporan keuangan. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melihat baik dan tidaknya kinerja pemerintah daerah. Diharapkan dari Opini audit tahun sebelumnya mampu menjadi pelajaran dan motivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah kearah yang semakin baik. Oleh karena itu, opini audit ialah hal penting yang bisa digunakan sebagai alat ukur penilaian kinerja. Dengan Opini audit yang semakin baik, menunjukkan kinerja pemerintah daerah menjadi semakin baik.

Adanya penelitian dari (Az Zahrah et al., 2024; Insani et al., 2023) yang menyatakan bahwa Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menjadikan Opini Audit Tahun Sebelumnya menjadi salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3 : Opini Audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.5.4 Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari alokasi dana perimbangan adalah untuk mengurangi perbedaan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, diharapkan bahwa alokasi dana perimbangan akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mengeksplorasi potensi ekonomi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD dan kinerja. Semakin meningkatnya dana yang diterima pemerintah daerah dari perimbangan, semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Dengan dana perimbangan yang cukup, pemerintah daerah bisa menjaga keseimbangan anggaran, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menciptakan kinerja keuangan yang lebih baik. Namun, jika terlalu bergantung pada dana perimbangan tanpa mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, dapat mengurangi kemandirian fiskal daerah.

Adanya penelitian dari (Insani et al., 2023; Maulina et al., 2021) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menjadikan Dana Perimbangan menjadi salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H4 : Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.5.5 Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, belanja modal adalah Pengeluaran anggaran digunakan untuk mendapatkan atau menambah aset tetap atau aset lain yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dan melebihi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lain yang ditetapkan Pemerintah. Berbelanja modal dengan efektif dan efisien dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan produktivitas ekonomi, kualitas infrastruktur, dan daya saing daerah. Namun, jika pengelolaan belanja modal tidak baik, bisa menambah utang daerah atau menyebabkan pemborosan sumber daya. Penelitian yang dilakukan (Az Zahrah et al., 2024; Suandani & Astawa, 2021) Anggaran yang digunakan untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi dikenal sebagai belanja modal. Karena alokasi belanja modal selalu berhubungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum, jumlah alokasi tahunan harus relatif besar. Persentase belanja modal yang lebih besar menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih produktif.

Adanya penelitian dari (Az Zahrah et al., 2024; Insani et al., 2023) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah, menjadikan Belanja Modal menjadi salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H5 : Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian yang bersifat kuantitatif yang didapatkan dengan tidak langsung melalui dokumen atau mediator pihak lain yang terlibat dalam penelitian. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengujian teori menggunakan variabel berupa angka serta melakukan analisis data dengan menggunakan produk statistik (Rais, 2020). Data sekunder adalah jenis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono, (2013) merupakan wilayah yang tergeneralisasi atau secara umum mengacu pada subjek/objek yang menjadi fokus penelitian, yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu sehingga dapat dipelajari dan di masa depan kesimpulan. Berdasarkan judul yang dipakai, maka populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.2.2 Sampel

Dari populasi yang telah dibahas sebelumnya, maka ditentukanlah teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga

sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa sampling jenuh melibatkan semua anggota populasi sebagai sampel. Penelitian ini mengumpulkan data dokumenter menggunakan dokumen atau arsip di lokasi penelitian.. Jenis data dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah di audit BPK RI dan Opini Audit tahun 2014 sampai dengan tahun 2023.

3.3 Jenis Dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merujuk kepada informasi yang diperoleh oleh pengumpul data dari sumber yang tidak langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah diaudit BPK RI dan Opini Audit tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, dan website BPK RI yaitu www.bpk.go.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi ialah cara untuk memperoleh informasi dan data dalam berbagai macam bentuk seperti buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang diringkas dalam laporan yang disertai dengan keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2013). Data yang didapatkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses serta mengunduh

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota yang di Provinsi Jawa Tengah yang sudah di audit BPK RI dan Opini Audit BPK RI Tahun 2014 sampai dengan 2023 diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, dan website BPK RI yaitu www.bpk.go.id.

3.5 Definisi operasional variabel

3.5.1 Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau hasil keterkaitan antara kedua variabel tersebut (Sugiyono, 2013). Variabel variabel terikat pada penelitian ini ialah kinerja keuangan.

3.5.1.1 Kinerja Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018) menyatakan bahwa kinerja keuangan berguna untuk mendapatkan hasil kinerja dari layanan yang telah diberikan (rentabilitas), untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas), kewajibannya (solvabilitas) serta kemampuan dalam menerima imbalan atas jasa layanan yang telah dilakukan untuk membiayai pengeluaran. Analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan rasio Efisiensi

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan pendapatan dan menerima pendapatan yang sebenarnya. Pada saat Pemerintah Daerah mengumpulkan pendapatan, kategori kinerja keuangannya akan dianggap efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menandakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

semakin baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghitung dengan teliti berapa biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan seluruh pendapatannya. Hal ini penting untuk mengetahui apakah kegiatan pengumpulan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rasio Efisiensi Keuangan daerah

Rasio Efisiensi =	$\frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan daerah}}$	X 100%
-------------------	--	--------

Tabel 3. 2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: (Fathah, 2017)

3.5.2 Variabel Independen

Sugiyono, (2013) menyatakan bahwa variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Opini Audit BPK RI tahun sebelumnya.

3.5.2.1 Target Pendapatan Asli daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga dikenal sebagai APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah

yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Target PAD adalah perkiraan jumlah pendapatan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Menetapkan target adalah hal yang penting karena dapat membantu mengukur seberapa baik kinerja keuangan dan efektivitas dalam mengelola sumber daya daerah. Meningkatkan target PAD tidak hanya untuk tambah uang daerah, tapi juga untuk dorong pembangunan dan layanan publik yang lebih baik. Dengan menaikkan jumlah PAD, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mendanai pembangunan tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup dengan menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang memadai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 2009 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah sah yang diizinkan oleh undang-undang. Menurut Putri & Darmayanti, (2019), Karena pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan daerah, kemampuan suatu daerah untuk menggali PAD akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan daerah. Rumus untuk mengukur Target PAD sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rasio Target PAD

$\text{Rasio Target PAD} = \frac{\text{Total Anggaran PAD}}{\text{Total Anggaran Pendapatan daerah}} \times 100\%$
--

Sumber: (Syifa Fatimah et al., 2023)

3.5.2.2 Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah

Menurut Kawatu (2019) Pertumbuhan pendapatan sangat penting untuk menentukan apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran mengalami peningkatan atau penurunan. Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan atau mempertahankan pertumbuhan pendapatan mereka dari satu periode ke periode berikutnya ditunjukkan oleh rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Cara menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Rasio Pertumbuhan PAD

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD}_t - \text{Realisasi PAD}_{t-1}}{\text{Realisasi PAD}_t} \times 100\%$$

Sumber: (Fathah, 2017)

3.5.2.3 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan bahwa opini adalah pernyataan profesional yang dibuat setelah memeriksa kebenaran informasi dalam laporan keuangan. Skala ordinal digunakan untuk variabel opini audit. Opini audit diberikan nilai berdasarkan pada hasil opini audit BPK RI, nilainya sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Skala Nilai Opini Audit

Opini Audit	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	1
Opini selain Wajar Tanpa Pengecualian	0

Sumber: (Lestari & Hapsari, 2020)

3.5.2.4 Dana Perimbangan

Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Penerimaan dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus adalah komponen dari dana perimbangan. Rumus untuk mengukur Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Rasio Dana Perimbangan

Rasio Dana Perimbangan =	$\frac{\text{Total Realisasi Dana Perimbangan}}{\text{Total Realisasi Pendapatan daerah}}$	X 100%
--------------------------	--	--------

Sumber: (Insani et al., 2023)

3.5.2.5 Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membeli atau menambah aset tetap atau aset lain yang memberi manfaat ekonomis selama lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dan melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lain yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal termasuk belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan, jalan, dan jaringan, belanja modal lainnya, dan belanja modal BLU. Rumus untuk mengukur Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal =	$\frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja daerah}}$	X 100%
-----------------------	--	--------

Sumber: (Antari & Sedana, 2018)

Tabel 3. 8 Ringkasan Variabel dan Indikator

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Variabel Dependen			
1	Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan menjelaskan terkait kemahiran suatu perusahaan dalam manajemen serta mengontrol sumber daya yang mereka miliki (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018).	<p>Diukur dengan menggunakan rasio Efisiensi</p> <p>a. Rasio Efisiensi</p> $= \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$ <p>Kategori:</p> <p>Efisien = kurang dari 100%</p> <p>Efisiensi Berimbang = 100%</p> <p>Tidak Efisien = 100% keatas</p> <p style="text-align: right;">Sumber: (Fathah, 2017)</p>
Variabel Independen			
1	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target PAD adalah perkiraan jumlah pendapatan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Sumber: (Syifa Fatimah et al., 2023)	<p>Diukur dengan:</p> $= \frac{\text{Total Anggaran PAD}}{\text{Total Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$ <p>Sumber: (Syifa Fatimah et al., 2023)</p>
2	Pertumbuhan PAD	Menurut Kawatu (2019) Pertumbuhan pendapatan sangat penting untuk menentukan apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran mengalami peningkatan atau penurunan.	<p>Diukur dengan:</p> $\frac{\text{Realisasi PAD}_t - \text{Realisasi PAD}_{t-1}}{\text{Realisasi PAD}_t} \times 100\%$ <p>Sumber: (Fathah, 2017)</p>
3	Opini Audit Tahun Sebelumnya	suatu pernyataan profesional sebagai kesimpulan yang memeriksa kredibilitas informasi dalam laporan keuangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 2004).	<p>Diukur dengan Skala Nilai Opini Audit:</p> <p>a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = skor 1</p> <p>b. Selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = skor 0</p> <p>(Lestari & Hapsari, 2020b)</p>

4	Dana Perimbangan	Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Penerimaan dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus adalah komponen dari dana perimbangan. Sumber: (Insani et al., 2023)	Diukur dengan: $= \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$ Sumber : (Insani et al., 2023)
5	Belanja Modal	Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membeli atau menambah aset tetap atau aset lain yang memiliki manfaat ekonomis selama lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dan melebihi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lain yang ditetapkan pemerintah. Sumber Peraturan.	Diukur dengan: $= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$ Sumber: : (Antari & Sedana, 2018)

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ialah teknik statistik yang dipakai untuk memberikan gambaran awal dari keadaan atau karakteristik data tanpa melakukan pengujian hipotesis. Pada jenis analisis ini Peneliti (Ghozali, 2018) berpendapat bahwa analisis ini secara umum pengukurannya dilakukan dengan menggunakan sejumlah sampel dan menunjukkan nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai variabel dependen

dalam penelitian ini. Untuk variabel independen terdiri dari Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan PAD, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.

3.6.2 Uji Regresi Linear Berganda

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengungkapan *sustainability report* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu teknik analisis regresi berganda karena dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan lebih dari satu. Persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1. X_1 + \beta_2. X_2 + \beta_3. X_3 + \beta_4. X_4 + \beta_5. X_5 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α : Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5}$: Koefisien regresi variabel independen

X₁ : Pengungkapan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₂ : Pengungkapan Pertumbuhan PAD

X₃ : Pengungkapan Opini Audit Tahun Sebelumnya

X₄ : Pengungkapan Dana Perimbangan

X₅ : Pengungkapan Belanja Modal

E : error terms (tingkat kesalahan pengganggu)

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis bersama dengan regresi berganda maka data harus dilakukan pengujian berupa uji asumsi klasik dengan tujuan data yang dihasilkan dapat bersifat BLUE (*Best, Linear, Unbiased, Estimator*) agar model regresi dalam data tersebut tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sehingga memastikan bahwa data yang diperoleh akan terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018).

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menentukan normal atau tidaknya suatu data. Dalam hal ini histogram, garis normal, dan *kolmogorov smirnov* digunakan untuk melihat normalitas dari data. Data yang normal maka akan memiliki kriteria yaitu bentuk kurva data yang loncengnya tepat ditengah histogram, data berada menempel pada garis normal, dan signifikansi *kolmogorov smirnov* di atas 5 %.

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji jenis ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui seberapa konsistensi varian pengganggu antar pengamatan. Metode scatter plot dapat berguna untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Peneliti (Ghozali, 2018) berpendapat bahwa apabila plot data menyebar dengan pola yang tidak teratur, data tersebut dianggap tidak memiliki heteroskedastisitas.

3.6.3.3 Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk menemukan residual yang berhubungan dengan periode sebelumnya. *Runs Test* adalah salah satu bagian statistic non-parametrik, untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang kuat yang tinggi antar residual. Jika antar residual memiliki korelasi yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Pada dasarnya *Runs Test* adalah suatu metode yang berguna untuk melihat apakah suatu data diambil secara acak atau tidak.

Dasar pengambilan Keputusan dalam uji *Runs Test* untuk menentukan ada tidaknya gejala autokorelasi yaitu:

1. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi;
2. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi.

3.6.3.4 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya korelasi atau tidaknya antar variabel bebasnya. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas yang cukup berbahaya. Untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas atau tidak dapat menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Data yang terbebas dari multikolinearitas memiliki kriteria sebagai berikut : apabila tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2018).

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji beda t-test berguna untuk menguji berapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan untuk meneliti secara individual dalam menjelaskan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan Keputusan yang digunakan dalam uji t sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis statistika

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya tidak ada pengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, artinya ada pengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Menentukan Tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5% , 10% , yaitu dengan:

- a. Df numerator = $df_n = df_1 = k - 1$

- b. Df denominator = $df_d = df = n - k$

keterangan:

$df_n = \text{degree of freedom/derajat kebebasan}$

$n = \text{jumlah sampel}$

$k = \text{banyaknya pemeriksaan keputusan}$

3. Menentukan pemeriksaan keputusan

- a. H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai signifikan $< 0,05$, menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

- b. H_0 diterima dan H_a ditolak jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak sangat dipengaruhi oleh variabel independen.

3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) bertujuan untuk menguji pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengujian sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis statistika

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Menentukan Tingkat signifikansi $\alpha = 1\%$, 5% , 10% , yaitu dengan:

- a. Df numerator = $df_n = df_1 = k - 1$

- b. Df denominator = $df_d = df = n - k$

keterangan:

$df_n = \text{degree of freedom/derajat kebebasan}$

$n = \text{jumlah sampel}$

$k = \text{banyaknya pemeriksaan keputusan}$

3. Menentukan pemeriksaan keputusan

- a. H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai signifikan $< 0,05$, menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

- b. H_0 diterima dan H_a ditolak jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak sangat dipengaruhi oleh variabel independen.

3.6.4.3 Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam hal ini semakin besar nilai dari uji ini maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya dan sebaliknya. Nilai R^2 ini terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang rendah atau mendekati nilai 0 maka variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependennya. Dan nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen yang signifikan menyediakan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian mengarahkan peneliti untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen yaitu Taget Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan PAD, dana perimbangan, belanja modal dan Opini Audit tahun sebelumnya terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi ini terletak di bagian tengah Pulau Jawa, dengan enam Kota di dalamnya. Provinsi Jawa Tengah terletak di bagian tengah Pulau Jawa, dengan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Jawa Tengah sendiri seluas 32.548 atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Dimana penelitian menggunakan periode tahun 2014 sampai dengan 2023. Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan I tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,97 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 16,505. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 23,53%.

4.2 Analisis Data

Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 6 pemerintah daerah kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2014 sampai dengan 2023. Peneliti memperoleh

sampel akhir sebanyak 60 melalui proses pengambilan sampel berdasarkan jumlah sampel yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dengan melihat jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi, analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang variabel penelitian. Metode yang paling umum digunakan untuk menentukan nilai sentral dari suatu distribusi data adalah pengukuran mean; sebaliknya, nilai minimum adalah nilai yang paling rendah dari distribusi data, dan nilai maksimum adalah nilai yang paling tinggi. Simpangan baku, juga dikenal sebagai deviasi standar, adalah penyimpangan rata-rata nilai data dari nilai rata-ratanya. Hasil statistic deskriptif menggunakan SPSS pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Target PAD (X1)	60	15,34	59,35	28,2832	8,92461
Pertumbuhan PAD (X2)	60	-14,15	56,22	10,1818	13,21762
Opini Tahun Sebelumnya (X3)	60	,00	1,00	,7333	,44595
Dana Perimbangan (X4)	60	33,98	69,80	56,1310	9,27804
Belanja Modal (X5)	60	8,07	29,47	19,4852	5,32565
Kinerja Keuangan (Y)	60	84,38	109,17	99,3978	4,93986
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut, dapat dijelaskan hasil statistic deskriptif sebagai berikut:

1. Target PAD (X1) dengan nilai terendah (*minimum*) adalah Kota Pekalongan pada tahun 2014 sebesar 15,34 sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) adalah

Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 59,35 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk Target PAD sebesar 28,2832. Standar deviasi untuk Target PAD menunjukkan rata-rata sebesar 8,92461. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa jika standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, nilai item lebih beragam atau lebih tidak akurat dengan mean. Sebaliknya, jika standar deviasi lebih kecil, nilai item lebih serupa atau lebih akurat dengan mean.

2. Pertumbuhan PAD (X2) dengan nilai terendah (*minimum*) adalah Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar -14,15, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kota Salatiga pada tahun 2014 sebesar 56,22 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk Pertumbuhan PAD sebesar 10,1818. Standar deviasi untuk Pertumbuhan PAD menunjukkan rata-rata sebesar 13,21762. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa jika standar deviasi lebih besar dari rata-rata, maka nilai item lebih beragam atau lebih tidak akurat dengan mean. Sebaliknya, jika standar deviasi lebih kecil, nilai item lebih serupa atau lebih akurat dengan mean.
3. Opini Audit Tahun Sebelumnya (X3) menggunakan variabel dummy memiliki nilai rendah (*minimum*) adalah 0 di beberapa kota sedangkan dengan nilai tertinggi (*maximum*) adalah 1 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk Opini Audit tahun sebelumnya sebesar 0,7333. Simpangan baku (*standard deviation*) untuk derajat desentralisasi sebesar 0,44595. Dari hasil tersebut standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, maka dapat diartikan semakin akurat dengan *mean*.
4. Dana Perimbangan (X4) dengan nilai terendah (*minimum*) adalah Kota Semarang pada tahun 2018 sebesar 33,98, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebesar 69,80 dan nilai rata-rata

(*mean*) untuk Dana Perimbangan sebesar 56,1310. Standar deviasi untuk Dana perimbangan menunjukkan rata-rata sebesar 9,27804. Dari hasil tersebut standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, maka dapat diartikan semakin akurat dengan *mean*. Jika nilai standar deviasi lebih besar, nilai item lebih beragam atau kurang akurat dengan mean. Sebaliknya, jika nilai deviasi lebih kecil, nilai item lebih serupa atau lebih akurat dengan mean.

5. Belanja Modal (X5) dengan nilai terendah (*minimum*) adalah Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar 8,07, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 29,47 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk Belanja Modal sebesar 19,4852. Standar deviasi untuk Belanja Modal menunjukkan rata-rata sebesar 5,32565. Dari hasil tersebut standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, maka dapat diartikan semakin akurat dengan *mean*. Jika nilai standar deviasi lebih besar, nilai item lebih beragam atau kurang akurat dengan mean. Sebaliknya, jika nilai deviasi lebih kecil, nilai item lebih serupa atau lebih akurat dengan mean.
6. Kinerja Keuangan (Y) dengan nilai terendah (*minum*) adalah Kota Magelang pada tahun 2020 sebesar 84,38 sedangkan dengan nilai tertinggi (*maximum*) adalah Kota Semarang pada tahun 2017 sebesar 109,17 dan nilai rata-rata (*mean*) untuk Kinerja Keuangan sebesar 99,3978. Simpangan baku (*standard deviation*) untuk Kinerja Keuangan adalah sebesar 4,93986. Dari hasil tersebut standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, maka dapat diartikan semakin akurat dengan *mean*.

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian terhadap asumsi klasik yang akan dilakukan meliputi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas penelitian ini, uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) non-parametrik digunakan. Nilai probabilitas dalam uji ini harus lebih besar dari 0,05, dan jika nilainya lebih rendah dari 0,05, maka data berdistribusi normal.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		60	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	4,00404143	
Most Extreme Differences	Absolute	,090	
	Positive	,049	
	Negative	-,090	
Test Statistic		,090	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,264	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,253
		Upper Bound	,276

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Seluruh data terdistribusi normal dapat diwakili dengan nilai signifikansi atau probabilitas Kinerja Keuangan (Y) 0,200, yang lebih besar dari 0,05, menurut hasil uji Kolmogorov-Smirnov.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Nilai *Tolerance* dan *Variant Inflation Factors* (VIF) dijadikan sebagai indikator uji multikolinieritas. Terjadi multikolinieritas dalam penulisan jika nilai VIF lebih dari atau sama dengan 10

dan nilai toleransi kurang dari atau sama dengan 0,1. Hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Target PAD (X1)	,314	3,187
Pertumbuhan PAD (X2)	,841	1,188
Opini Tahun Sebelumnya (X3)	,783	1,277
Dana Perimbangan (X4)	,329	3,035
Belanja Modal (X5)	,927	1,078

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Hasil uji multikolinieritas yang ditunjukkan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerabilitas kurang dari 0,10. Nilai faktor penginflasian variabel (VIF) juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak menemukan gejala multikolinieritas.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser untuk menentukan apakah ada heteroskedastisitas dalam model regresi. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan dalam perbedaan antara residual dan pengamatan lain. Heteroskedastisitas tidak terjadi pada data bila nilai Sig lebih besar dari 0,05. Berikut ialah tabel yang menampilkan temuan uji *Breusch-Pagan* yang digunakan dalam penulisan ini.

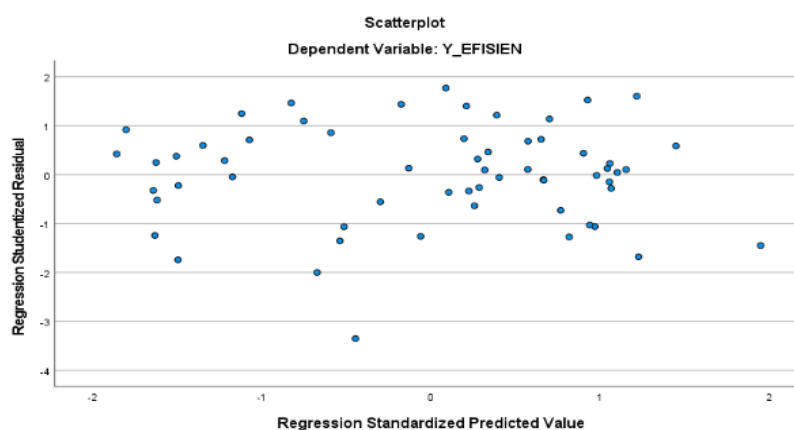
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Unstandarized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	8,080	5,503		1,468	,148
Target PAD (X1)	-,023	,068	-,079	-,334	,629
Pertumbuhan PAD (X2)	,006	,028	,073	,212	,740
Opini Tahun Sebelumnya (X3)	,419	,862	,073	,486	,833
Dana Perimbangan (X4)	-,057	,064	-,205	-,889	,378
Belanja Modal (X5)	-,081	,066	-,167	-1,216	,229

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Dari hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Begitu pula pada uji Scatterplot data dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Scatterplot dapat dilihat pada Gambar 4.1. Diketahui pada Gambar 4.1 di bawah bahwa titik-titik pada grafik terlihat menyebar dan tidak menumpuk pada satu tempat, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4. 1 Hasil Uji Scatterplot pada Kinerja Keuangan (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Salah satu cara untuk memeriksa apakah *error problematis* model regresi linier pada periode t (periode penulisan) berhubungan dengan *unsettling error* pada periode $t-1$ (sebelumnya) ialah dengan menerapkan uji autokorelasi. Penulisan ini menggunakan uji *Run Test* untuk analisis autokorelasi. Jika nilai signifikansi atau nilai asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka data tidak menunjukkan adanya hubungan. Hasil pengujian RunTest penulisan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test

	Standardized Residual (Y1)
Total Cases	60
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,298

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Temuan *Run Test* menunjukkan nilai asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,298 lebih dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian tidak terdapat korelasi hipotesis pada data yang diteliti.

4.2.3 Analisis Regresi Berganda

Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dapat dilihat arah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Penulisan menggunakan analisis ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan dependen terhadap satu sama lain dan apakah terdapat hubungan sebab akibat di antara keduanya. Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014 sampai dengan 2023 menjadi subjek penulisan ini yang menggunakan analisis regresi linier berganda

untuk menguji pengaruh Target PAD, Pertumbuhan PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap kinerja keuangan.

Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Persamaan Regresi untuk Kinerja Keuangan (Y)

	Unstandarize d B	Coefficient s Std. Error	Standariz ed Coefficie nts Beta	t	Sig.
(Constant)	62,302	8,818		7,066	<,001
Target PAD (X1)	,382	,109	,690	3,501	<,001
Pertumbuhan PAD (X2)	-,011	,045	-,030	-,250	,804
Opini Tahun Sebelumnya (X3)	2,831	1,381	,256	2,051	,045
Dana Perimbangan (X4)	,347	,102	,651	3,387	,001
Belanja Modal (X5)	,251	,106	,270	2,362	,022

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 4.7 diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = 62,302 + ,382X_1 - ,011X_2 + 2,831X_3 + ,347X_4 + ,251X_5 + e$$

Rumus diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 62,302 menunjukkan variabel independen Target PAD, Pertumbuhan PAD, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Dana Perimbangan, Belanja Modal, bernilai konstan atau sama dengan bernilai 0. Dengan demikian nilai variabel dependen atau kinerja keuangan sebesar 62,302 satuan.
- b. Nilai koefisien Target Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar ,382 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap naiknya Target Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% maka Kinerja Keuangan akan meningkat sebesar ,382X1 dengan asumsi semua variabel independen konstan.

- c. Koefisien pertumbuhan PAD (X2) adalah -0,011 dengan nilai negatif, yang berarti bahwa dengan asumsi semua variabel independen konstan, kinerja keuangan akan menurun sebesar $-0,011 \times X_2$ untuk setiap kenaikan 1% pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.
- d. Nilai koefisien Opini Audit Tahun Sebelumnya (X3) sebesar 2,831 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap naiknya Opini Audit Tahun Sebelumnya sebesar 1% maka Kinerja Keuangan akan meningkat sebesar $2,831 \times X_3$ dengan asumsi semua variabel independen konstan.
- e. Nilai koefisien Dana Perimbangan (X4) sebesar ,347 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap naiknya Dana Perimbangan sebesar 1% maka Kinerja Keuangan akan meningkat sebesar $,347 \times X_4$ dengan asumsi semua variabel independen konstan.
- f. Nilai koefisien belanja modal (X5) adalah,251, yang memiliki nilai positif, yang berarti bahwa dengan asumsi semua variabel independen konstan, kinerja keuangan akan meningkat sebesar $,251 \times X_5$ dengan setiap kenaikan 1% pada belanja modal.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

4.2.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pada dasarnya, uji signifikansi F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Uji F juga digunakan untuk menentukan apakah keenam variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Dalam penelitian ini, nilai F-hitung dan F-tabel dibandingkan. Hipotesis yang ditolak

adalah bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan jika F-hitung kurang dari F-tabel. Sebaliknya, jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan.

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

F-hitung	Sign.	Simpulan
5,638	<0,001 ^b	Berpengaruh simultan

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F-hitung untuk kinerja keuangan 5,638 lebih besar dari F-tabel, yaitu 2,54, dan nilai signifikansi <0,001 lebih rendah dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan PAD, peningkatan PAD, dana perimbangan, belanja modal, dan opini audit tahun sebelumnya secara bersamaan mempengaruhi kinerja keuangan.

4.2.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah pernyataan atau klaim peneliti itu benar. Sejauh mana suatu variabel mempengaruhi sebagian variabel lainnya ditentukan oleh pengujian ini. Berdasarkan nilai signifikansi tersebut, prasyarat untuk mencapai penilaian hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis dianggap valid jika nilai signifikansinya minimal 0,05. Sebaliknya, hipotesis nol ditolak jika nilai sig melebihi 0,05. Analisis ini berdasarkan tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji t

	Unstandarize d B	Coefficient s Std. Error	Standariz ed Coefficie nts Beta	t	Sig.
(Constant)	62,302	8,818		7,066	<,001
Target PAD (X1)	,382	,109	,690	3,501	<,001
Pertumbuhan PAD (X2)	-,011	,045	-,030	-,250	,804
Opini Tahun Sebelumnya (X3)	2,831	1,381	,256	2,051	,045
Dana Perimbangan (X4)	,347	,102	,651	3,387	,001
Belanja Modal (X5)	,251	,106	,270	2,362	,022

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

1. H1: Target Pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Nilai t hitung sebesar 3,501 untuk variabel Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar dari nilai t tabel sebesar 2,0040 yang ialah hasil pengujian hipotesis pertama (H1) variabel ini. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah sampel dikurangi total variabel sehingga didapatkan nilai 54 yang dalam t tabel memiliki 2,0040. Untuk nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis (H1) yang menyatakan “Target Pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” **diterima**.

2. H2: Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Nilai t hitung sebesar -,250 untuk variabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil dari nilai t tabel sebesar 2,0040 yang ialah hasil

pengujian hipotesis pertama (H2) variabel ini. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah sampel dikurangi total variabel sehingga didapatkan nilai 54 yang dalam t tabel memiliki 2,0040. Untuk nilai signifikan sebesar $0,804 > 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis (H2) yang menyatakan “Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” **ditolak**.

3. H3: Opini Audit Tahun Sebelumnya memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Nilai t hitung sebesar 2,051 untuk variabel Opini Audit Tahun Sebelumnya besar dari nilai t tabel sebesar 2,0040 yang ialah hasil pengujian hipotesis pertama (H3) variabel ini. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah sampel dikurangi total variabel sehingga didapatkan nilai 54 yang dalam t tabel memiliki 2,0040. Untuk nilai signifikan sebesar $0,045 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis (H3) yang menyatakan “Opini Audit Tahun Sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” **diterima**.

4. H4: Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Nilai t hitung sebesar 3,387 untuk variabel Dana Perimbangan besar dari nilai t tabel sebesar 2,0040 yang ialah hasil pengujian hipotesis pertama (H4) variabel ini. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah sampel dikurangi total variabel sehingga didapatkan nilai 54 yang dalam t tabel memiliki 2,0040.

Untuk nilai signifikan sebesar $0,045 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis (H4) yang menyatakan “Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” **diterima**.

5. H5: Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Nilai t hitung sebesar 2,362 untuk variabel Belanja Modal besar dari nilai t tabel sebesar 2,0040 yang ialah hasil pengujian hipotesis pertama (H5) variabel ini. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah sampel dikurangi total variabel sehingga didapatkan nilai 54 yang dalam t tabel memiliki 2,0040. Untuk nilai signifikan sebesar $0,045 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis (H5) yang menyatakan “Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” **diterima**.

4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen, uji R^2 digunakan. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi dihitung dengan nilai R^2 yang disesuaikan..

Tabel 4. 9 Hasil Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,586	,343	,282

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Dari hasil uji R^2 dari Kinerja Keuangan (Y), diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,282 atau 28,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dapat dijelaskan sebesar 28,2% oleh variabel independen yaitu Target PAD,

Pertumbuhan PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini Audit Tahun Sebelumnya. Sedangkan untuk penjelasan sisanya sebesar 71,8% dijelaskan oleh variabel selain dari penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1. Target Pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Menurut hasil uji hipotesis, variabel Target Pendapatan Asli Daerah memengaruhi kinerja keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 3,501 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2.0040 dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga **H1 diterima**. Ini menunjukkan bahwa Target Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat berfungsi dengan semestinya. Semakin tepat pemerintah daerah dalam memperkirakan perekonomian di masa depan dengan membuat target PAD maka semakin meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memperoleh hasil bahwa Target Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, (Syifa Fatimah et al., 2023; Az Zahrah et al., 2024; Bilqis & Priyono, 2023; Ginting et al., 2023; Padang & Padang, 2023; S. P. Putri & Ratnawati, 2023). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Azhar, 2021; Lestari & Hapsari, 2020a; Pratama et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa Target Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penetapan target pendapatan asli daerah (PAD) yang realistis dan terukur diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, semakin bagus perencanaan dan mencapai target PAD, semakin bagus juga kinerja keuangan yang terlihat dalam pengelolaan anggaran dan pembiayaan daerah. Apabila pemerintah daerah menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi namun tidak didukung dengan kemampuan pengelolaan yang cukup, maka dapat berdampak pada ketidakstabilan dalam mencapai kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, dengan mengangkat target Pendapatan Asli Daerah yang realistis dan dapat dicapai, maka dapat menciptakan stabilitas keuangan daerah, memperbaiki pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kemampuan fiskal untuk mendukung pembangunan daerah.

4.3.2. Pertumbuhan PAD memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji hipotesis, pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak memengaruhi kinerja keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar $-0,250$ lebih kecil dari nilai t tabel sebesar $2,0048$ dan nilai signifikan sebesar $0,804 > 0,05$ sehingga **H2 ditolak**. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mungkin belum memenuhi syarat untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan (Rohyana & Rozaq, 2022).

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini terjadi karena meskipun PAD mengalami kenaikan, jika pengelolaannya tidak efisien akan berdampak pada

kinerja keuangan daerah. Selain itu peningkatan pertumbuhan PAD, bergantung juga pada ketergantungan berlebihan pada sumber pendapatan yang tidak stabil. Pertumbuhan PAD yang tidak menjamin kinerja keuangan yang baik, juga dapat disebabkan oleh seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Kenaikan PAD sering kali diimbangi dengan peningkatan belanja daerah yang tidak efisien. Pengeluaran belanja untuk menunjang optimalisasi PAD yang tidak disertai dengan strategi yang baik, akan menimbulkan lebih banyak biaya yang dikeluarkan dari pada pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus diiringi dengan penerapan kebijakan fiskal yang baik, pengelolaan anggaran yang transparan, dan prioritas belanja yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah secara optimal dengan lebih menekan biaya operasional.

4.3.3. Opini Audit Tahun Sebelumnya memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,051 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,0040 dan nilai signifikan sebesar $0,045 < 0,05$ sehingga hipotesis pertama **H3 diterima**. Hal ini berarti peran Opini Audit Tahun Sebelumnya dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berfungsi dengan semestinya. Semakin baik opini audit BPK tahun sebelumnya yang diperoleh pemerintah daerah, maka dapat menunjukkan semakin termotivasinya pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja keuangan ke arah yang lebih baik.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memperoleh hasil bahwa Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Az Zahrah et al., 2024; Insani et al., 2023) . Namun penelitian tidak sejalan dengan (Nasution et al., (2023), Pratama et al., (2022)), yang menyimpulkan bahwa Opini Audit Tahun Sebelumnya tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah, sebagai agen, harus terus berusaha menerapkan manajemen keuangan yang baik dan selalu menerima opini audit yang baik. Pemerintah daerah menjadikan opini audit tahun sebelumnya sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja keuangan tahun selanjutnya berdasarkan pada catatan-catatan yang dituangkan pada LHP BPK. Dengan opini audit pemerintah daerah yang lebih baik, masyarakat akan lebih percaya pada cara pemerintah mengelola keuangan pemerintah daerah; kinerja keuangannya dapat diukur dengan membandingkan kinerja keuangan sebelumnya dan saat ini.. Rasio kinerja keuangan ini bisa menunjukkan seberapa baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

4.3.4. Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel perimbangan dana memengaruhi kinerja keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 3,387 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,0040 dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga hipotesis pertama **H4 diterima**. Hal ini berarti peran Untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan dapat digunakan dengan benar. Setiap peningkatan dana perimbangan dari

pemerintah pusat akan menghasilkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memperoleh hasil bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Insani et al., 2023; Maulina et al., 2021). Namun penelitian tidak sejalan dengan (Padang & Padang, 2023; S. P. Putri & Ratnawati, 2023) yang menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi perbedaan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, diharapkan bahwa alokasi dana perimbangan akan membuat pemerintah daerah lebih mampu mengeksplorasi potensi ekonomi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin meningkatnya dana yang diterima pemerintah daerah dari perimbangan, semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Dengan dana perimbangan yang cukup, pemerintah daerah bisa menjaga keseimbangan anggaran, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menciptakan kinerja keuangan yang lebih baik. Namun, jika terlalu bergantung pada dana perimbangan tanpa mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, dapat mengurangi kemandirian fiskal daerah.

4.3.5. Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Menurut hasil uji hipotesis, variabel Belanja Modal memengaruhi Kinerja Keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,362 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,0040 dan nilai signifikan sebesar $0,022 < 0,05$ sehingga hipotesis pertama **H5 diterima**. Hal ini berarti peran Belanja modal untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diterima.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memperoleh hasil bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Az Zahrah et al., (2024), Ginting et al., (2023) . Namun penelitian tidak sejalan dengan (Bilqis & Priyono, 2023; Padang & Padang, 2023) yang menyimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja modal sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memastikan belanja modal digunakan secara efektif untuk menciptakan aset yang memberikan manfaat jangka panjang. Karena alokasi belanja modal selalu berhubungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum, jumlah alokasi tahunan harus relatif besar. Semakin banyak uang yang dialokasikan untuk belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih produktif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis tentang pengaruh Target PAD, Pertumbuhan PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014 sampai dengan 2023. Dari uji-uji yang telah dilakukan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Target PAD terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti peran Target Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berfungsi dengan semestinya.
2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti peran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat berfungsi dengan semestinya.
3. Opini Audit Tahun Sebelumnya terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti peran Opini Audit Tahun Sebelumnya dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berfungsi dengan semestinya.

4. Terbukti bahwa Dana Perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan, yang berarti bahwa peran Dana Perimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Terbukti bahwa belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan; dengan demikian, peran belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diterima dengan baik.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan yang telah disajikan di atas, implikasi yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian ini yaitu:

- Bagi Pemerintah
 - (1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran, bahwa target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, opini audit tahun sebelumnya yang diperoleh, dana perimbangan yang direalisasikan, dan belanja modal yang direalisasikan dengan baik dapat menjamin kinerja keuangan pemerintah baik.
 - (2) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - (3) Bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bahan masukan, motivasi serta evaluasi untuk mengembangkan strategi, kebijakan maupun program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pada penulisan ini ada beberapa batasan sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini, variabel bebas (target PAD, opini audit tahun sebelumnya, dana perimbangan, belanja modal) hanya dapat menjelaskan variabel terikat (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) sebesar 28,20%. Artinya 71,80% kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terdapat pada penelitian ini.
2. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sehingga hasil penelitian belum bisa menyentuh analisis yang lebih mendalam seperti mengapa pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan objek pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga belum mencakup seluruh bentuk pemerintahan yang ada.
4. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya dan diubah, ada kemungkinan bahwa terjemahan instrumen yang salah dapat mengubah arti atau membuat peneliti salah memahami maksud sebenarnya.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Dengan melihat kekurangan pada penelitian ini, diharapkan ada penelitian selanjutnya yang serupa di masa yang akan datang untuk memperbaiki kekurangan yang ada di penelitian ini. Berikut ini saran untuk peneliti mendatang:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan atau menambahkan variabel-variabel seperti seperti pertumbuhan ekonomi, realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dengan menggunakan alat ukur lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian pemerintah daerah lain untuk memperkaya penelitian kedepannya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode kualitatif untuk mendalami analisis mengenai peran Target PAD, Pertumbuhan PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Opini Audit Tahun dalam mempengaruhi Kinerja Keuangan. Dengan banyaknya penelitian yang dilakukan mengenai hal yang mempengaruhi kinerja keuangan, diharapkan akan menjadi dasar yang lebih kuat sebagai bahan kajian kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangan di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. Sh. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi* , 5, 30–38.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Az Zahrah, F., Zaen, M. R., & Mellinia, S. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 2(1), 369–384.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa (The Effect Of Regional Local Revenue On Financial Performance Of The Langsa City Government). *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(2), 164–174.
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020. *Jurnal Economia*, 2(2), 612–621.
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 104–117.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *EBBANK* , 8(1), 33–48.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS (Ketiga)* (Vol. 105). Universitas Diponegoro.
- Ginting, J. A., Yulsiati, henny, & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7, 315–320.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Efektif per 1 Januari 2018*. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Insani, A., Rahayu, S., Erwati, M., & Jambi, U. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125.

- Institut Akuntansi Publik Indonesia. (2021a). *Akuntan Publik Standar Audit 700 (Revisi 2021) Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan*. <http://www.iapi.or.id>
- Institut Akuntansi Publik Indonesia. (2021b). *Akuntan Publik Standar Audit 705 (Revisi 2021) Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen*. <http://www.iapi.or.id>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Lestari, E., & Hapsari, D. W. (2020a). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2013-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2743–2750.
- Lestari, E., & Hapsari, D. W. (2020b). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2743–2750.
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi sektor publik*. ANDI.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2302–8556, 1150–1182.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Nasution, S. N. R., Meutia, T., & Harahap, A. Y. (2023). Pengaruh Opini Auditor, Good Corporate Governance Dan Return Saham Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 196–208.

- Nengsih, R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 12(2), 24–32.
- Padang, N. N., & Padang, S. W. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *JRAK*, 9(2), 303–318. www.djpk.depkeu.go.id
- Parwanto, E., & Harto, P. (2017). Pengaruh Hasil Pemeriksaan Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(1), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Republik Indonesia (2017).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PERSERODA), Republik Indonesia (2022).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, Republik Indonesia (2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Republik Indonesia (2023).
- Pratama, A. B., Maslichah, & Cholid Mawardi M. (2022). Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019. *E-JRA*, 11(2), 25–34.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(2), 2068–2082. <https://doi.org/10.36778/jesy.v6i2.1230>

- Putry, N. A. C., & Rudy, B. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JRMB*, 12(1), 25–34.
- Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020). Disclosure of Local Government Financial Statements in South Sulawesi. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 456, 1–6. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201021.001>
- Rais, R. G. P. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dprk Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRK Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 11–20. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2276>
- Rohyana, C., & Rozaq, R. A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Kineja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Land Journal*, 3(2), 60–71.
- Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018). Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage Dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). / *AT-TASYRI*, 10(1), 9–21.
- Septariani, J., & Asoka, R. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 17(2), 162–180.
- Suandani, K. P., & Astawa, I. G. P. B. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 2614–1930.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syifa Fatimah, T., Millah Irsyadin, M., & Putri Amanda, A. (2023). Pengaruh Anggaran dan Realisasi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)*, 1(3), 124–138. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v1i3>
- Trianto, A. (2010). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang*. 65–77.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Republik Indonesia (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Republik Indonesia (2022).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Republik Indonesia (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Republik Indonesia (2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Republik Indonesia (2014).
- Verawaty, Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*. 19(1), 21–37.
- Wiguna, K. Y. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 37–50.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Anggaran PAD

ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH				
PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH Tahun 2014-2023				
DALAM RIBUAN RUPIAH				
No.	Tahun/Kota	Anggaran PAD	Anggaran Pendapatan Daerah	%
1	2014_Kota Magelang	124,432,498	714,749,756	17.41%
2	2015_Kota Magelang	152,805,995	768,696,905	19.88%
3	2016_Kota Magelang	197,465,478	823,177,275	23.99%
4	2017_Kota Magelang	218,085,185	927,645,879	23.51%
5	2018_Kota Magelang	225,916,332	902,675,937	25.03%
6	2019_Kota Magelang	242,404,290	911,970,000	26.58%
7	2020_Kota Magelang	240,421,207	905,069,141	26.56%
8	2021_Kota Magelang	251,821,562	895,988,562	28.11%
9	2022_Kota Magelang	326,375,069	930,455,547	35.08%
10	2023_Kota Magelang	306,460,000	985,930,000	31.08%
11	2014_Kota Pekalongan	115,235,452	751,087,541	15.34%
12	2015_Kota Pekalongan	155,549,952	818,541,441	19.00%
13	2016_Kota Pekalongan	177,984,656	901,999,688	19.73%
14	2017_Kota Pekalongan	197,597,634	930,201,554	21.24%
15	2018_Kota Pekalongan	199,813,870	915,211,690	21.83%
16	2019_Kota Pekalongan	209,577,100	972,541,579	21.55%
17	2020_Kota Pekalongan	172,993,386	909,607,710	19.02%
18	2021_Kota Pekalongan	214,208,310	930,156,232	23.03%
19	2022_Kota Pekalongan	255,833,693	984,981,114	25.97%
20	2023_Kota Pekalongan	240,810,000	967,820,000	24.88%
21	2014_Kota Salatiga	114,781,747	598,676,244	19.17%
22	2015_Kota Salatiga	143,835,170	747,219,445	19.25%
23	2016_Kota Salatiga	172,775,326	928,398,150	18.61%
24	2017_Kota Salatiga	188,391,649	877,849,094	21.46%
25	2018_Kota Salatiga	209,772,712	895,371,154	23.43%
26	2019_Kota Salatiga	221,089,796	931,351,872	23.74%
27	2020_Kota Salatiga	197,768,282	669,614,569	29.53%
28	2021_Kota Salatiga	237,406,216	916,251,265	25.91%
29	2022_Kota Salatiga	218,644,039	905,568,013	24.14%
30	2023_Kota Salatiga	226,790,000	906,390,000	25.02%
31	2014_Kota Semarang	891,280,705	2,865,509,578	31.10%
32	2015_Kota Semarang	1,107,053,257	3,263,824,536	33.92%
33	2016_Kota Semarang	1,337,039,529	3,767,910,297	35.48%
34	2017_Kota Semarang	1,692,399,101	3,967,691,653	42.65%
35	2018_Kota Semarang	1,811,352,289	4,340,520,828	41.73%
36	2019_Kota Semarang	2,128,176,142	4,731,415,495	44.98%
37	2020_Kota Semarang	1,889,598,813	4,360,490,267	43.33%
38	2021_Kota Semarang	2,607,693,086	5,115,782,365	50.97%
39	2022_Kota Semarang	2,533,643,458	5,018,846,406	50.48%
40	2023_Kota Semarang	2,865,710,000	4,828,500,000	59.35%
41	2014_Kota Surakarta	318,814,097	1,538,848,822	20.72%
42	2015_Kota Surakarta	361,019,672	1,596,393,728	22.61%
43	2016_Kota Surakarta	394,200,858	1,875,301,335	21.02%
44	2017_Kota Surakarta	492,503,909	1,797,903,966	27.39%
45	2018_Kota Surakarta	505,328,291	1,867,608,630	27.06%
46	2019_Kota Surakarta	567,757,961	2,002,535,207	28.35%
47	2020_Kota Surakarta	402,870,481	1,789,457,853	22.51%
48	2021_Kota Surakarta	514,200,704	1,945,769,363	26.43%
49	2022_Kota Surakarta	740,143,061	2,152,659,533	34.38%
50	2023_Kota Surakarta	820,670,000	2,106,610,000	38.96%
51	2014_Kota Tegal	226,068,305	814,049,500	27.77%
52	2015_Kota Tegal	250,114,043	930,866,573	26.87%
53	2016_Kota Tegal	273,470,357	1,081,649,763	25.28%
54	2017_Kota Tegal	310,927,508	1,067,221,788	29.13%
55	2018_Kota Tegal	305,484,446	1,044,527,704	29.25%
56	2019_Kota Tegal	306,557,626	1,081,591,230	28.34%
57	2020_Kota Tegal	276,449,738	1,055,069,738	26.20%
58	2021_Kota Tegal	317,488,239	1,046,876,732	30.33%
59	2022_Kota Tegal	381,994,269	1,100,872,973	34.70%
60	2023_Kota Tegal	416,660,000	1,137,850,000	36.62%

Lampiran 2: Pertumbuhan PAD

PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH				
PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH Tahun 2014-2023				
DALAM RIBUAN RUPIAH				
No.	Tahun/Kota	Selisih PAD (t-(t-1))	Total PAD t-1	%
1	2014_Kota Magelang	57,187,792.27	107,739,838.96	53.08%
2	2015_Kota Magelang	21,749,778.85	164,927,631.23	13.19%
3	2016_Kota Magelang	33,638,438.62	186,677,410.08	18.02%
4	2017_Kota Magelang	13,241,865.65	220,315,848.70	6.01%
5	2018_Kota Magelang	16,319,709.99	233,557,714.36	6.99%
6	2019_Kota Magelang	23,705,507.80	249,877,424.35	9.49%
7	2020_Kota Magelang	17,173,884.36	273,582,932.15	6.28%
8	2021_Kota Magelang	28,634,461.32	290,756,816.51	9.85%
9	2022_Kota Magelang	57,976,667.48	319,391,277.83	18.15%
10	2023_Kota Magelang	-52,698,313.70	377,367,945.31	-13.96%
11	2014_Kota Pekalongan	16,499,622.61	127,565,801.41	12.93%
12	2015_Kota Pekalongan	7,979,172.32	144,065,424.02	5.54%
13	2016_Kota Pekalongan	26,559,864.54	152,044,596.33	17.47%
14	2017_Kota Pekalongan	13,398,410.31	178,604,460.87	7.50%
15	2018_Kota Pekalongan	-12,778,462.48	192,002,871.18	-6.66%
16	2019_Kota Pekalongan	33,553,026.60	179,224,408.70	18.72%
17	2020_Kota Pekalongan	17,090,500.07	212,777,435.29	8.03%
18	2021_Kota Pekalongan	22,169,069.11	229,867,935.36	9.64%
19	2022_Kota Pekalongan	11,438,944.69	252,037,004.47	4.54%
20	2023_Kota Pekalongan	-120,212.34	263,475,949.17	-0.05%
21	2014_Kota Salatiga	59,647,194.58	106,100,450.50	56.22%
22	2015_Kota Salatiga	1,262,910.09	165,747,645.08	0.76%
23	2016_Kota Salatiga	36,758,096.84	167,010,555.17	22.01%
24	2017_Kota Salatiga	16,474,709.12	203,768,652.02	8.09%
25	2018_Kota Salatiga	-11,317,304.10	220,243,361.13	-5.14%
26	2019_Kota Salatiga	27,160,841.34	208,926,057.03	13.00%
27	2020_Kota Salatiga	-16,547,498.04	236,086,898.37	-7.01%
28	2021_Kota Salatiga	61,145,537.47	219,539,400.33	27.85%
29	2022_Kota Salatiga	-39,725,059.17	280,684,937.80	-14.15%
30	2023_Kota Salatiga	43,576,420.93	240,959,878.63	18.08%
31	2014_Kota Semarang	212,447,917.99	925,919,310.51	22.94%
32	2015_Kota Semarang	63,214,549.97	1,138,367,228.49	5.55%
33	2016_Kota Semarang	290,064,121.61	1,201,581,778.46	24.14%
34	2017_Kota Semarang	300,240,478.61	1,491,645,900.07	20.13%
35	2018_Kota Semarang	29,387,724.58	1,791,886,378.67	1.64%
36	2019_Kota Semarang	245,059,315.34	1,821,274,103.25	13.46%
37	2020_Kota Semarang	-41,795,610.28	2,066,333,418.59	-2.02%
38	2021_Kota Semarang	361,406,950.17	2,024,537,808.31	17.85%
39	2022_Kota Semarang	160,046,989.18	2,385,944,758.48	6.71%
40	2023_Kota Semarang	289,158,397.21	2,545,991,747.66	11.36%
41	2014_Kota Surakarta	35,434,760.62	298,400,846.63	11.87%
42	2015_Kota Surakarta	38,962,819.54	333,835,607.25	11.67%
43	2016_Kota Surakarta	52,704,352.27	372,798,426.79	14.14%
44	2017_Kota Surakarta	102,041,445.91	425,502,779.06	23.98%
45	2018_Kota Surakarta	-2,418,670.28	527,544,224.97	-0.46%
46	2019_Kota Surakarta	20,894,453.43	525,125,554.69	3.98%
47	2020_Kota Surakarta	-53,243,799.48	546,020,008.12	-9.75%
48	2021_Kota Surakarta	67,803,788.45	492,776,208.64	13.76%
49	2022_Kota Surakarta	86,860,588.25	560,579,997.09	15.49%
50	2023_Kota Surakarta	39,886,017.37	647,440,585.33	6.16%
51	2014_Kota Tegal	65,558,831.85	176,377,335.08	37.17%
52	2015_Kota Tegal	29,665,240.49	241,936,166.93	12.26%
53	2016_Kota Tegal	15,742,482.54	271,601,407.42	5.80%
54	2017_Kota Tegal	19,486,766.18	287,343,889.95	6.78%
55	2018_Kota Tegal	-31,809,207.54	306,830,656.13	-10.37%
56	2019_Kota Tegal	10,554,340.39	275,021,448.59	3.84%
57	2020_Kota Tegal	-18,994,806.88	285,575,788.98	-6.65%
58	2021_Kota Tegal	41,535,858.19	266,580,982.10	15.58%
59	2022_Kota Tegal	31,938,128.94	308,116,840.29	10.37%
60	2023_Kota Tegal	-3,211,087.72	340,054,969.23	-0.94%

Lampiran 3: Dana Perimbangan

DANA PERIMBANGAN				
PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH Tahun 2014-2023				
DALAM RIBUAN RUPIAH				
No.	Tahun/Kota	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Daerah	%
1	2014_Kota Magelang	459,785,205.17	735,116,114.41	62.55%
2	2015_Kota Magelang	462,804,716.47	781,335,799.51	59.23%
3	2016_Kota Magelang	567,636,707.55	840,042,626.53	67.57%
4	2017_Kota Magelang	553,115,007.61	909,525,862.92	60.81%
5	2018_Kota Magelang	570,455,641.25	908,089,485.91	62.82%
6	2019_Kota Magelang	574,099,278.96	967,785,834.24	59.32%
7	2020_Kota Magelang	525,575,219.06	946,188,761.54	55.55%
8	2021_Kota Magelang	530,420,759.13	994,366,987.78	53.34%
9	2022_Kota Magelang	525,532,389.94	985,763,798.07	53.31%
10	2023_Kota Magelang	568,108,603.44	1,012,649,071.85	56.10%
11	2014_Kota Pekalongan	475,269,482.76	762,110,364.36	62.36%
12	2015_Kota Pekalongan	491,178,295.67	809,733,612.47	60.66%
13	2016_Kota Pekalongan	598,621,163.83	857,642,985.78	69.80%
14	2017_Kota Pekalongan	586,158,869.31	915,920,377.50	64.00%
15	2018_Kota Pekalongan	586,379,794.86	905,231,572.57	64.78%
16	2019_Kota Pekalongan	610,332,820.95	971,624,464.12	62.82%
17	2020_Kota Pekalongan	567,310,188.41	953,155,394.61	59.52%
18	2021_Kota Pekalongan	586,305,746.12	966,372,557.05	60.67%
19	2022_Kota Pekalongan	613,870,006.76	989,013,074.93	62.07%
20	2023_Kota Pekalongan	646,663,283.12	1,028,430,783.47	62.88%
21	2014_Kota Salatiga	449,752,498.95	727,619,868.81	61.81%
22	2015_Kota Salatiga	455,982,623.94	750,581,558.96	60.75%
23	2016_Kota Salatiga	569,849,837.88	879,784,189.26	64.77%
24	2017_Kota Salatiga	593,098,550.93	882,746,082.11	67.19%
25	2018_Kota Salatiga	561,012,927.70	889,992,411.25	63.04%
26	2019_Kota Salatiga	569,354,886.05	928,019,899.15	61.35%
27	2020_Kota Salatiga	522,042,585.44	890,223,683.93	58.64%
28	2021_Kota Salatiga	534,246,583.06	946,191,087.52	56.46%
29	2022_Kota Salatiga	548,480,698.28	918,353,779.92	59.72%
30	2023_Kota Salatiga	577,244,229.10	987,276,298.50	58.47%
31	2014_Kota Semarang	1,274,767,390.28	3,166,016,041.57	40.26%
32	2015_Kota Semarang	1,270,371,271.67	3,347,160,206.44	37.95%
33	2016_Kota Semarang	1,644,277,729.72	4,103,151,795.48	40.07%
34	2017_Kota Semarang	1,640,978,289.91	3,964,574,307.58	41.39%
35	2018_Kota Semarang	1,438,790,841.08	4,234,394,060.36	33.98%
36	2019_Kota Semarang	1,738,443,043.62	4,565,340,827.42	38.08%
37	2020_Kota Semarang	1,669,101,931.83	4,400,500,838.48	37.93%
38	2021_Kota Semarang	1,699,819,686.10	4,822,887,281.74	35.24%
39	2022_Kota Semarang	1,789,632,874.64	4,969,436,543.01	36.01%
40	2023_Kota Semarang	1,894,259,369.91	5,352,871,275.78	35.39%
41	2014_Kota Surakarta	797,295,017.69	1,525,575,850.95	52.26%
42	2015_Kota Surakarta	755,728,419.47	1,568,482,686.62	48.18%
43	2016_Kota Surakarta	1,103,862,166.26	1,703,003,848.00	64.82%
44	2017_Kota Surakarta	1,048,161,106.39	1,803,920,801.91	58.10%
45	2018_Kota Surakarta	1,090,922,293.67	1,879,056,016.68	58.06%
46	2019_Kota Surakarta	1,110,329,047.18	1,945,953,241.92	57.06%
47	2020_Kota Surakarta	1,045,123,446.17	1,831,319,373.39	57.07%
48	2021_Kota Surakarta	1,056,913,508.39	1,939,268,856.77	54.50%
49	2022_Kota Surakarta	1,156,908,079.10	2,028,438,691.05	57.03%
50	2023_Kota Surakarta	1,098,087,666.83	1,989,199,313.34	55.20%
51	2014_Kota Tegal	437,444,087.26	818,667,346.50	53.43%
52	2015_Kota Tegal	500,849,967.27	947,468,621.45	52.86%
53	2016_Kota Tegal	688,199,236.19	1,051,121,466.01	65.47%
54	2017_Kota Tegal	644,940,136.54	1,024,765,938.28	62.94%
55	2018_Kota Tegal	602,567,259.37	987,244,236.62	61.04%
56	2019_Kota Tegal	641,682,768.02	1,036,963,763.53	61.88%
57	2020_Kota Tegal	623,096,507.71	1,017,915,109.37	61.21%
58	2021_Kota Tegal	598,207,554.02	1,030,986,510.45	58.02%
59	2022_Kota Tegal	620,139,282.29	1,042,635,845.20	59.48%
60	2023_Kota Tegal	637,511,834.93	1,052,246,607.76	60.59%

Lampiran 4: Variabel Belanja Modal

BELANJA MODAL				
PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH Tahun 2014-2023				
DALAM RIBUAN RUPIAH				
No.	Tahun/Kota	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	%
1	2014_Kota Magelang	127,622,979.22	682,223,870.41	18.71%
2	2015_Kota Magelang	141,308,934.01	735,860,862.15	19.20%
3	2016_Kota Magelang	221,924,457.92	871,217,302.10	25.47%
4	2017_Kota Magelang	233,070,956.63	878,847,479.15	26.52%
5	2018_Kota Magelang	237,422,914.19	936,685,044.17	25.35%
6	2019_Kota Magelang	272,055,204.20	994,589,919.91	27.35%
7	2020_Kota Magelang	116,558,397.39	798,353,191.71	14.60%
8	2021_Kota Magelang	186,005,847.30	935,047,734.18	19.89%
9	2022_Kota Magelang	154,810,803.25	1,039,501,502.73	14.89%
10	2023_Kota Magelang	151,577,167.56	1,019,715,174.89	14.86%
11	2014_Kota Pekalongan	159,183,156.13	735,794,561.26	21.63%
12	2015_Kota Pekalongan	157,668,840.34	792,543,896.69	19.89%
13	2016_Kota Pekalongan	201,951,325.33	869,324,083.85	23.23%
14	2017_Kota Pekalongan	220,686,788.38	924,172,718.08	23.88%
15	2018_Kota Pekalongan	146,382,593.48	883,184,894.71	16.57%
16	2019_Kota Pekalongan	182,153,984.58	954,397,012.83	19.09%
17	2020_Kota Pekalongan	126,926,093.95	944,840,460.68	13.43%
18	2021_Kota Pekalongan	160,513,725.17	962,091,792.00	16.68%
19	2022_Kota Pekalongan	196,569,439.07	1,031,090,188.44	19.06%
20	2023_Kota Pekalongan	170,653,380.60	1,031,847,572.70	16.54%
21	2014_Kota Salatiga	120,272,968.73	645,787,982.70	18.62%
22	2015_Kota Salatiga	107,149,176.49	673,865,039.50	15.90%
23	2016_Kota Salatiga	267,294,856.86	919,667,517.13	29.06%
24	2017_Kota Salatiga	217,847,988.54	849,474,262.28	25.65%
25	2018_Kota Salatiga	222,021,981.99	923,538,238.49	24.04%
26	2019_Kota Salatiga	183,724,641.42	942,053,531.36	19.50%
27	2020_Kota Salatiga	174,131,330.59	944,296,168.94	18.44%
28	2021_Kota Salatiga	130,277,078.91	956,501,304.73	13.62%
29	2022_Kota Salatiga	75,192,210.13	931,871,471.27	8.07%
30	2023_Kota Salatiga	91,952,972.13	1,014,782,383.24	9.06%
31	2014_Kota Semarang	800,181,230.91	2,957,432,639.08	27.06%
32	2015_Kota Semarang	726,139,722.09	3,200,860,096.13	22.69%
33	2016_Kota Semarang	1,026,716,904.82	3,931,802,540.35	26.11%
34	2017_Kota Semarang	1,275,359,088.97	4,327,958,389.74	29.47%
35	2018_Kota Semarang	1,228,459,434.27	4,505,423,372.04	27.27%
36	2019_Kota Semarang	1,054,761,429.77	4,632,756,551.35	22.77%
37	2020_Kota Semarang	506,420,330.80	4,126,379,066.76	12.27%
38	2021_Kota Semarang	953,669,847.70	4,764,045,946.16	20.02%
39	2022_Kota Semarang	1,048,844,590.19	4,871,946,697.04	21.53%
40	2023_Kota Semarang	1,089,358,396.20	5,340,465,513.18	20.40%
41	2014_Kota Surakarta	286,491,756.99	1,479,827,902.47	19.36%
42	2015_Kota Surakarta	235,829,590.70	1,532,527,097.06	15.39%
43	2016_Kota Surakarta	307,534,354.57	1,680,456,921.16	18.30%
44	2017_Kota Surakarta	469,587,240.64	1,767,486,061.95	26.57%
45	2018_Kota Surakarta	523,770,318.15	1,913,787,493.28	27.37%
46	2019_Kota Surakarta	543,578,176.92	2,011,613,989.39	27.02%
47	2020_Kota Surakarta	250,969,805.19	1,638,665,726.42	15.32%
48	2021_Kota Surakarta	341,100,953.66	1,866,496,348.30	18.27%
49	2022_Kota Surakarta	380,832,881.83	2,087,823,395.60	18.24%
50	2023_Kota Surakarta	380,390,555.69	2,107,369,519.03	18.05%
51	2014_Kota Tegal	115,598,831.59	783,099,149.19	14.76%
52	2015_Kota Tegal	207,499,062.15	958,843,283.05	21.64%
53	2016_Kota Tegal	248,511,286.79	1,074,082,617.39	23.14%
54	2017_Kota Tegal	205,540,997.71	1,016,537,313.31	20.22%
55	2018_Kota Tegal	113,622,507.98	916,079,821.60	12.40%
56	2019_Kota Tegal	165,982,915.07	1,045,904,713.03	15.87%
57	2020_Kota Tegal	148,142,669.91	1,047,896,931.38	14.14%
58	2021_Kota Tegal	146,322,223.93	1,089,705,697.28	13.43%
59	2022_Kota Tegal	144,275,946.31	1,127,738,112.54	12.79%
60	2023_Kota Tegal	90,739,155.65	1,075,123,660.46	8.44%

Lampiran 5: Variabel Opini Audit BPK Tahun Sebelumnya

OPINI AUDIT BPK TAHUN SEBELUMNYA PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH Tahun 2014-2023 DALAM RIBUAN RUPIAH			
No.	Tahun/Kota	Opini Audit Tahun Sebelumnya	Dalam Bentuk Dummy
1	2014_Kota Magelang	WDP	0
2	2015_Kota Magelang	WDP	0
3	2016_Kota Magelang	WDP	0
4	2017_Kota Magelang	WTP	1
5	2018_Kota Magelang	WTP	1
6	2019_Kota Magelang	WTP	1
7	2020_Kota Magelang	WTP	1
8	2021_Kota Magelang	WTP	1
9	2022_Kota Magelang	WTP	1
10	2023_Kota Magelang	WTP	1
11	2014_Kota Pekalongan	WDP	0
12	2015_Kota Pekalongan	WDP	0
13	2016_Kota Pekalongan	WTP	1
14	2017_Kota Pekalongan	WTP	1
15	2018_Kota Pekalongan	WTP	1
16	2019_Kota Pekalongan	WTP	1
17	2020_Kota Pekalongan	WTP	1
18	2021_Kota Pekalongan	WTP	1
19	2022_Kota Pekalongan	WTP	1
20	2023_Kota Pekalongan	WTP	1
21	2014_Kota Salatiga	WDP	0
22	2015_Kota Salatiga	WDP	0
23	2016_Kota Salatiga	WDP	0
24	2017_Kota Salatiga	WTP	1
25	2018_Kota Salatiga	WTP	1
26	2019_Kota Salatiga	WTP	1
27	2020_Kota Salatiga	WTP	1
28	2021_Kota Salatiga	WTP	1
29	2022_Kota Salatiga	WTP	1
30	2023_Kota Salatiga	WTP	1
31	2014_Kota Semarang	WDP	0
32	2015_Kota Semarang	WDP	0
33	2016_Kota Semarang	WDP	0
34	2017_Kota Semarang	WTP	1
35	2018_Kota Semarang	WTP	1
36	2019_Kota Semarang	WTP	1
37	2020_Kota Semarang	WTP	1
38	2021_Kota Semarang	WTP	1
39	2022_Kota Semarang	WTP	1
40	2023_Kota Semarang	WTP	1
41	2014_Kota Surakarta	WTP	1
42	2015_Kota Surakarta	WTP	1
43	2016_Kota Surakarta	WTP	1
44	2017_Kota Surakarta	WTP	1
45	2018_Kota Surakarta	WTP	1
46	2019_Kota Surakarta	WTP	1
47	2020_Kota Surakarta	WTP	1
48	2021_Kota Surakarta	WTP	1
49	2022_Kota Surakarta	WTP	1
50	2023_Kota Surakarta	WTP	1
51	2014_Kota Tegal	WDP	0
52	2015_Kota Tegal	WDP	0
53	2016_Kota Tegal	WDP	0
54	2017_Kota Tegal	WDP	0
55	2018_Kota Tegal	WDP	0
56	2019_Kota Tegal	WTP	1
57	2020_Kota Tegal	WTP	1
58	2021_Kota Tegal	WTP	1
59	2022_Kota Tegal	WTP	1
60	2023_Kota Tegal	WTP	1

Lampiran Uji SPSS

Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Target PAD	60	15.34	59.35	28.2832	8.92461
Pertumbuhan PAD	60	-14.15	56.22	10.1818	13.21762
Opini Audit (t-1)	60	.00	1.00	.7333	.44595
Dana Perimbangan	60	33.98	69.80	56.1310	9.27804
Belanja Modal	60	8.07	29.47	19.4852	5.32565
Kinerja Keuangan	60	84.38	109.17	99.3978	4.93986
Valid N (listwise)	60				

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		60	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	4.00404143	
Most Extreme Differences	Absolute	.090	
	Positive	.049	
	Negative	-.090	
Test Statistic		.090	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.264	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.253
		Upper Bound	.276

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

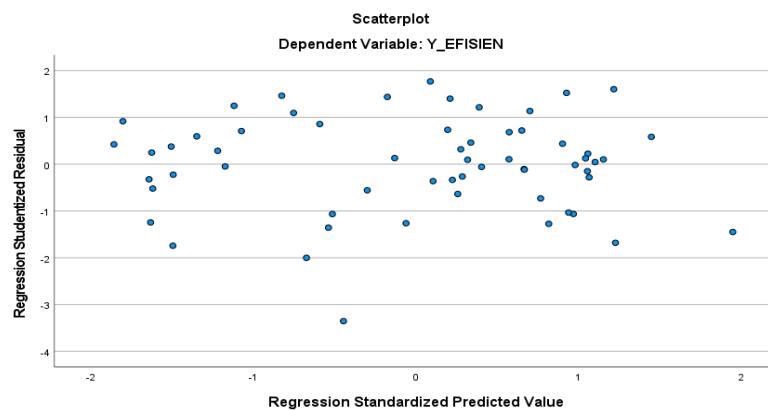
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Target_PAD	.314	3.187
	Pertumbuhan PAD	.841	1.188
	Opini Audit (t-1)	.783	1.277
	Dana Perimbangan	.329	3.035
	Belanja Modal	.927	1.078

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

2. Uji Heteroskedastisitas

- Scatterplot



- Uji Glester

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.080	5.503		1.468	.148
	Target PAD	-.023	.068	-.079	-.334	.740
	Pertumbuhan PAD	.006	.028	.031	.212	.833
	Opini Audit (t-1)	.419	.862	.073	.486	.629
	Dana Perimbangan	-.057	.064	-.205	-.889	.378
	Belanja Modal	-.081	.066	-.167	-1.216	.229

a. Dependent Variable: ABRESID

3. Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.39651
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	27
Z	-1.042
Asymp. Sig. (2-tailed)	.298

a. Median

Uji Regresi Linear Berganda**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	62.302	8.818		7.066	<.001
	Target PAD	.382	.109	.690	3.501	<.001
	Pertumbuhan PAD	-.011	.045	-.030	-.250	.804
	Opini Audit (t-1)	2.831	1.381	.256	2.051	.045
	Dana Perimbangan	.347	.102	.651	3.387	.001
	Belanja Modal	.251	.106	.270	2.362	.022

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Uji Hipotesis1. Uji R²**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.586 ^a	.343	.282	4.18531

a. Predictors: (Constant), Target PAD, Pertumbuhan PAD, Opini Audit (t-1), Dana Perimbangan, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

2. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	493.821	5	98.764	5.638	<.001 ^b
	Residual	945.909	54	17.517		
	Total	1439.730	59			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), BM, TARGET_PAD, PERTUMBUHAN, OPINI_SBLMN, DP

3. Uji t

		Coefficients^a				
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	62.302	8.818		7.066	<.001
	Target PAD	.382	.109	.690	3.501	<.001
	Pertumbuhan PAD	-.011	.045	-.030	-.250	.804
	Opini Audit (t-1)	2.831	1.381	.256	2.051	.045
	Dana Perimbangan	.347	.102	.651	3.387	.001
	Belanja Modal	.251	.106	.270	2.362	.022

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan